

**PENGARUH EFEKTIFITAS SISTEM PENGENDALIAN
INTERNAL DAN PENCEGAHAN KECURANGAN
AKUNTANSI TERHADAP AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
(Studi Kasus Pada OPD Kota Semarang)**

Skripsi

**Untuk memenuhi sebagai persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



Disusun Oleh :

Annisa Amalia

31401800027

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG**

2022

**PENGARUH EFEKTIFITAS SISTEM PENGENDALIAN
INTERNAL DAN PENCEGAHAN KECURANGAN
AKUNTANSI TERHADAP AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
(Studi Kasus Pada OPD Kota Semarang)**

Skripsi

**Untuk memenuhi sebagai persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi

**PENGARUH EFEKTIFITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN
PENCEGAHAN KECURANGAN AKUNTANSI TERHADAP
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
(Studi Kasus Pada OPD Kota Semarang)**

Disusun oleh:

Annisa Amalia

31401800027

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan dihadapan

sidang panitia ujian Skripsi

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 7 Juli 2022

Pembimbing



Dr. Kiryanto, SE., M.Si., Akt. CA
NIK. 211492004

**PENGARUH EFEKTIFITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN
PENCEGAHAN KECURANGAN AKUNTANSI TERHADAP
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
(Studi Kasus Pada OPD Kota Semarang)**

Disusun oleh:
Annisa Amalia

NIM: 31401800027

Telah dipertahankan didepan penguji

Pada tanggal 5 Agustus 2022

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing

Penguji I


Dr. Kiryanto, SE., M.Si, Akt., CA
NIK. 211492004


Provita Wijayanti, SE., M.Si, Ak., CA
NIK. 211403012

Penguji II


Devi Permatasari, SE., M.Si, Ak. CA
NIK. 211413024

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Tanggal 5 Agustus 2022

Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. Dra. Hj. Winarsih, SE, M.Si, CSRS
NIK.211415029

HALAMAN PERNYATAAN

Nama : Annisa Amalia
NIM : 31401800027
Program Studi : S1 Akuntansi
Fakultas : Fakultas Ekonomi
Universitas : Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Pengaruh Efektifitas Sistem Pengendalian Internal dan Pencegahan Kecurangan Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada OPD Kota Semarang” merupakan karya peneliti sendiri dan tidak ada unsur plagiarisme dengan cara yang tidak sesuai etika atau tradisi keilmuan. Peneliti siap menerima sanksi apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran etika akademik dalam proposal penelitian ini.

Semarang, 7 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Annisa Amalia

NIM. 31401800027

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Allah akan mencukupi orang yang bertawakal.”

(Q.S At-Thalaq: 3)

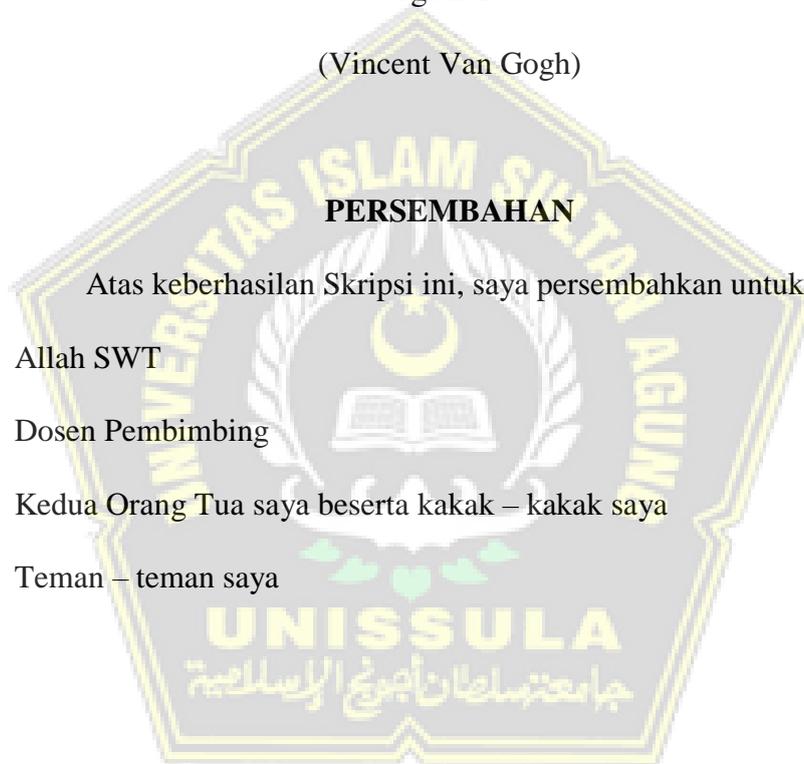
“Greats Things are not done by impulse, but by a series of small things brought together.”

(Vincent Van Gogh)

PERSEMBAHAN

Atas keberhasilan Skripsi ini, saya persembahkan untuk:

1. Allah SWT
2. Dosen Pembimbing
3. Kedua Orang Tua saya beserta kakak – kakak saya
4. Teman – teman saya



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh efektifitas sistem pengendalian internal dan pencegahan kecurangan akuntansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Semarang. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *non-probability sampling* dengan menggunakan metode *purposive sampling*, dimana sampel dipilih sesuai kriteria-kriteria tertentu. Sampel diambil sebanyak 102 responden dengan instrumen penelitian berupa kuesioner. Analisis data menggunakan SPSS 23.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektifitas sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pencegahan kecurangan akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

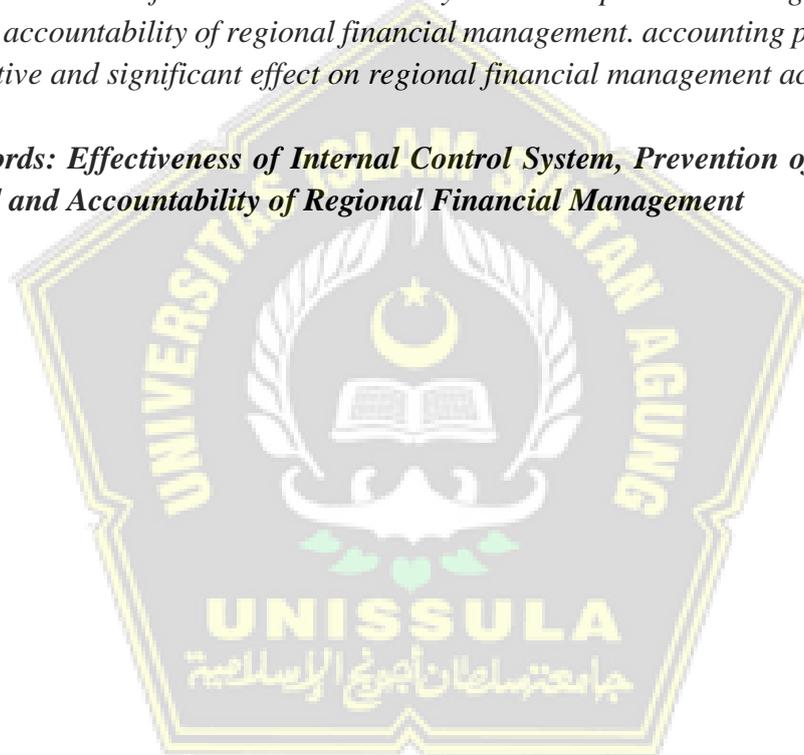
Kata Kunci: Efektifitas Sistem Pengendalian Internal, Pencegahan Kecurangan Akuntansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah



ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of the effectiveness of the internal control system and the prevention of accountability accounting on regional financial management. The population used in this study were employees of Regional Apparatus Organizations (OPD) in the city of Semarang. The sampling technique used was non-probability sampling using purposive sampling method, where the sample was selected according to certain criteria. The sample was taken as many as 102 respondents with the research instrument in the form of a questionnaire. Data analysis using SPSS 23.0. The results of this study indicate that the effectiveness of the internal control system has a positive and significant effect on the accountability of regional financial management. accounting prevention has a positive and significant effect on regional financial management accountability

Keywords: *Effectiveness of Internal Control System, Prevention of Accounting Fraud and Accountability of Regional Financial Management*



INTISARI

Akuntabilititas diartikan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilakukan secara berkala. Surat Keputusan LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 disebutkan bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan alat untuk mempertanggungjawabkan kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini menilai kinerja pemerintah secara transparan, sistematis, dan bertanggung jawab. Kondisi capaian Nilai SAKIP Kota Semarang 2019 dengan predikat B skor 67,92 masih dibawah capaian Nilai SAKIP pada Pemerintah Kota atau Kabupaten lainnya di Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa masih perlu melakukan peningkatan cara kerja agar terciptanya akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Penelitian ini mengungkap tentang permasalahan utama yaitu bagaimana meningkatkan efektifitas sistem pengendalian internal dan pencegahan kecurangan akuntansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan agar mampu mencapai target yang diharapkan.

Penelitian ini menggunakan data primer yang disebarkan dengan kuesioner. Sampel pada penelitian ini adalah kepala dinas, sekretaris, kepala sub.bagian keuangan yang mempunyai tanggungjawab penuh atas pengelolaan keuangan yang terdapat di OPD Kota Semarang sebanyak 102 responden. Metode pengambilan sampel dengan purposive sampling, sedangkan analisis data dengan regresi linear berganda menggunakan SPSS versi 23.0.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektifitas sistem pengendalian

internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dan pencegahan kecurangan akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan usulan penelitian Skripsi yang berjudul **“Pengaruh Efektifitas Sistem Pengendalian Internal Dan Pencegahan Kecurangan Akuntansi Terhadap Akuntabilitas”**. Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan semua pihak, sehingga dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Hj. Olivia Fachrunnisa, S.E., M.Si., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Ibu Mutoharoh, SE., M.Sc selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Kiryanto, SE., M.Si., Akt., CA selaku Dosen Pembimbing yang selalu sabar memberikan arahan, pengetahuan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Bapak Dedi Rusdi, SE., M.Si., Akt., CA selaku Dosen Wali yang telah memberi semangat dan motivasi dalam pengerjaan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Seluruh Staf Pengelola Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang senantiasa memberikan pelayan yang baik selama ini.

7. Kedua orang tua yang telah mendoakan, memberikan kasih sayang dan semangatnya.
8. Semua keluarga saya yang telah memberikan semangatnya.
9. Sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan semangat dan dukungan selama ini.
10. Teman-teman S1 Akuntansi angkatan 2018, terima kasih atas motivasi, dukungan dan kebaikan kalian selama ini.
11. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu penulis memohon maaf apabila dalam penulisan pra skripsi ini terdapat kesalahan, mengingat keterbatasan pengetahuan penulis. Namun penulis berharap semoga pra skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca yang budiman.

Semarang, 28 Mei 2021

Penulis



Annisa Amalia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
INTISARI.....	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1. Manfaat Teoritis	7
1.4.2. Manfaat Praktisi	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
2.1. Landasan Teori	8
2.1.1. Teori Keagenan	8
2.2. Variabel-Variabel Penelitian	9
2.2.1. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.....	9
2.2.2. Pencegahan Kecurangan Akuntansi (Fraud).....	12
2.2.3. Sistem Pengendalian Internal.....	20
2.3. Penelitian Terdahulu.....	24
2.4. Pengembangan Hipotesis.....	30

2.4.1. Pengaruh Efektifitas Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	30
2.4.2. Pengaruh Pencegahan kecurangan Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	31
2.5. Kerangka Pemikiran Teoritis.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
3.1. Jenis Penelitian	34
3.2. Populasi dan Sampel.....	34
3.2.1. Populasi.....	34
3.2.2. Sampel.....	34
3.3. Sumber dan Jenis Data	35
3.4. Metode Pengumpulan Data	35
3.5. Variabel, Definisi Operasional dan Indikator.....	35
3.5.1. Variabel Independen (X).....	35
3.5.2. Variabel Dependen (Y)	36
3.6. Teknik Analisis Data	37
3.6.1. Analisis Deskriptif	37
3.6.2. Uji Instrumen	37
3.6.3. Uji Asumsi Klasik.....	38
3.6.4. Analisis Regresi Linier Berganda	39
3.6.5. Analisis Uji Hipotesis	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42
4.1 Deskripsi Responden.....	42
4.1.1 Jenis Kelamin.....	42
4.1.2 Usia	43
4.1.3 Pendidikan.....	44
4.1.4 Lama Kerja.....	45
4.2 Deskripsi Variabel.....	45
4.2.1 Efektifitas Sistem Pengendalian Internal (X1).....	47
4.2.2 Pencegahan Kecurangan Akuntansi (X2)	48
4.2.3 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	50

4.3. Uji Instrumen.....	52
4.3.1. Uji Validitas.....	52
4.3.2. Uji Reliabilitas.....	53
4.4. Uji Asumsi Klasik	54
4.4.1 Uji Normalitas.....	54
4.4.2 Uji Multikolinearitas.....	54
4.4.3 Uji Heteroskedastisitas.....	55
4.5. Hasil Uji Regresi Linier Berganda	56
4.5.1 Pengujian Hipotesis	57
4.5.2 Uji F (Simultan).....	59
4.5.3. Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	59
4.6 Pembahasan	60
4.6.1 Pengaruh Efektifitas Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	60
4.6.2 Pengaruh Pencegahan Kecurangan Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	62
BAB V PENUTUP.....	64
5.1 Simpulan.....	64
5.2 Saran	64
5.3. Keterbatasan Penelitian	65
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN.....	70

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Nilai SAKIP Kota Semarang	2
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	25
Tabel 3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	36
Tabel 4. 1 Jumlah Sampel Berkumpul	42
Tabel 4. 2 Deskripsi Jenis Kelamin.....	43
Tabel 4. 3 Deskripsi Usia	43
Tabel 4. 4 Deskripsi Pendidikan	44
Tabel 4. 5 Deskripsi Lama Kerja	45
Tabel 4. 6 Deskripsi Efektifitas Sistem Pengendalian Internal.....	47
Tabel 4. 7 Deskripsi Pencegahan Kecurangan Akuntansi	49
Tabel 4. 8 Deskripsi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	51
Tabel 4. 9 Uji Validitas Data.....	53
Tabel 4. 10 Hasil Pengujian Reliabilitas.....	54
Tabel 4. 11 Uji Kolmogorov Smirnov	54
Tabel 4. 12 Pengujian Multikolinearitas	55
Tabel 4. 13 Pengujian Heteroskedastisitas.....	56
Tabel 4. 14 Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	56
Tabel 4. 15 Hasil Uji Hipotesis	58
Tabel 4. 16 Uji F	59
Tabel 4. 17 Uji Koefisien Determinasi	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian	33
--------------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, diubah dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 32 Tahun 2004, membawa paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu aspek penting dari kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi adalah peningkatan pelayanan publik terkait dengan terwujudnya kesejahteraan rakyat dan peningkatan daya saing daerah. Ada kebutuhan untuk mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk bertindak demi kepentingan masyarakat lokal dengan berusaha memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan akuntabel dan untuk memastikan pemerintah responsif terhadap tuntutan lingkungan.

Akuntabilitas diartikan sebagai perwujudan kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan menjalankan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh media pertanggungjawaban, yang dilakukan secara berkala (Zawawi, 2016). Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan pengendalian, terutama yang berkaitan dengan pencapaian hasil dalam pelayanan publik dan penyampaian yang transparan kepada masyarakat. Nurkhamid (2008) dalam Tiara Dewi, Muhammad Amir Masruhim (2016) mendefinisikan akuntabilitas kinerja sebagai bentuk kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan semua keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai berbagai tujuan dan sasaran yang disajikan secara

teratur oleh suatu media akuntabilitas yang dikelola pemerintah yang didirikan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 589/IX/6/Y/1999 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, diperbaharui dengan Peraturan LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 menyatakan bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan alat untuk mempertanggungjawabkan kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini menilai kinerja pemerintah secara transparan, sistematis, dan bertanggung jawab.

Termuat di dalam Perpres No. 29 tahun 2014 dan Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015 mengenai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) dan Pedoman Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perolehan Nilai SAKIP Kota Semarang pada Tahun 2015-2019 mengalami peningkatan predikat, berikut merupakan ilustrasi yang tersaji dalam tabel:

Tabel 1.1
Nilai SAKIP Kota Semarang Tahun 2015-2019

Indikator	2016	2017	2018	2019
Nilai Sakip	52,43	55,49	60,28	67,92
Predikat	CC	CC	B	B

Keterangan :

C = > 30 – 50 (kurang)

CC = > 50 – 60 (cukup)

B = > 60 – 70 (baik)

BB = > 70 – 80 (sangat baik)

A = > 80 – 90 (memuaskan)

AA = > 90 – 100 (sangat memuaskan)

Tabel diatas menunjukkan jika terjadi peningkatan kinerja SAKIP Kota Semarang dengan gelar atau Predikat B pada tahun 2019 dengan skor tumpuan 67,92 menunjukkan adanya kinerja yang baik sehingga efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran dikatakan cukup memadai. Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dari yang ditargetkan B terealisasi B atau berhasil mencapai target sejumlah 100%. Namun capaian nilai SAKIP Kota Semarang masih dibawah capaian nilai SAKIP pada Pemerintah Kota atau Kabupaten lainnya di Jawa Tengah. Hal tersebut bisa dilihat bahwa Pemerintah Kabupaten Banyumas mendapat predikat BB atau sangat baik yaitu dengan nilai 73,84. Selain Pemerintah Kabupaten Banyumas, ada tiga wilayah lain di Jawa Tengah yang juga sukses meraih predikat BB. Ketiga kabupaten itu ialah Kabupaten Cilacap 73,19, Wonogiri 73,07, dan Kota Pekalongan 72,59. Sementara kota/kabupaten lainnya masih berada pada kategori B dan CC. Hal ini menunjukkan bahwa masih perlu melakukan peningkatan cara kerja agar terciptanya akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk tercipta pemerintah yang dapat diandalkan. Penyelenggara publik harus memahami bahwa mereka harus bertanggung jawab kepada publik atas pekerjaannya.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas dari seorang pegawai OPD, salah satunya sistem pengendalian internal. Berdasarkan PP 60 Tahun 2008 dalam Wardani et al., (2017), sistem pengendalian internal merupakan proses integral atas tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh manajemen dan seluruh karyawan untuk memberikan keyakinan terhadap kinerja melalui efektivitas dan efisiensi tujuan bisnis untuk menciptakan operasi, keandalan

pelaporan keuangan, keamanan aset, dan kepatuhan terhadap peraturan. Menerapkan pengendalian internal yang tepat akan memberikan kepercayaan pada kualitas atau keandalan laporan keuangan dan meningkatkan kepercayaan stakeholder. Implementasi dari *internal control system* yang tepat setidaknya akan menjamin terselenggaranya suatu akuntabilitas dan transparansi dari para OPD.

Penelitian Sari et al., (2020) dan Karyadi (2019) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan penelitian yang dilakukan Agustin (2019) sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, adapun penelitian Mufidah & Sari (2018), Oktaviani & Sari (2020) dan Abubakar et al (2017) mendapati hasil bahwasanya *internal control system* sama sekali tidak berhubungan dengan tingkat akuntabilitas dari pengelolaan dana desa.

Efektifitas dan efisiensi dari kinerja perangkat daerah membutuhkan suatu rancangan *internal control* untuk mencegah terjadinya *fraud* baik yang disengaja maupun tidak. Pencegahan Fraud adalah tindakan yang dilakukan guna mencegah adanya risiko potensial dari kegiatan-kegiatan yang beresiko adanya manipulasi atau mark-up baik yang disengaja maupun tidak (Andari & Ismatullah, 2019). Sekian banyak upaya untuk mencegah adanya kecurangan dan kasus korupsi telah dilakukan dari sisi internal pemerintah, salah satunya adalah melakukan sosialisasi pencegahan fraud atau kecurangan. Sistem whistleblowing dipilih sebagai sarana bagi para karyawan pemerintahan untuk mendukung pencegahan fraud, yang mana pegawai diberikan kemudahan melaporkan segala tindakan yang mengarah pada kecurangan yang diakses melalui telepon, faksimile, sms, website, surel dan

pengiriman surat.

Pemerintah telah mengeluarkan peraturan wajib lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), semua penyelenggara negara yang masuk dalam kategori wajib lapor, wajib melaporkan seluruh harta kekayaannya. Pemerintah juga telah mempekerjakan staf yang jujur dan terbuka yang menggunakan sistem CAT untuk mencegah dan memberantas korupsi terkait suap. Pemerintah telah memberikan akses kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan pencegahan korupsi melalui Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018, yang mengharapkan masyarakat untuk berperan aktif dalam melaporkan kegiatan penipuan. Semakin banyak kecurangan pelaporan yang dapat diminimalisir, maka akuntabilitas pemerintah akan semakin meningkat sehingga tujuan ekonomi dan sosial pemerintah bisa tercapai.

Hasil penelitian Yudanto (2016) yang menyatakan bahwa kecenderungan kecurangan akuntansi berdampak negatif terhadap akuntabilitas organisasi. Tindakan kecurangan yang terjadi dalam suatu organisasi niscaya akan mengurangi akuntabilitas organisasi karena laporan yang dihasilkan organisasi tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Sedangkan hasil penelitian Pratiwi et al., (2016) menyatakan bahwa kecenderungan kecurangan akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja otoritas pemerintah. Dimana pengurangan kecurangan akuntansi yang telah diterapkan akan berdampak pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dari susunan fenomena yang tampak pada ilustrasi diatas serta hasil referensi dari beberapa penelitian terjadi perbedaan satu dengan lainnya. Sehingga menarik

untuk dilakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Pengaruh Efektifitas Sistem Pengendalian Internal dan Pencegahan Kecurangan Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada OPD Kota Semarang)”**. Perbedaan penelitian adalah adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu dimana sistem pengendalian internal belum mampu memaksimalkan akuntabilitas keuangan daerah dengan diimbangi pencegahan kecurangan akuntansi dapat membawa pengaruh baik terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Objek dari penelitian kali ini adalah staff OPD Kota Semarang sehingga menggunakan objek yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

1.2. Rumusan Masalah

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban instansi pemerintah pusat atau daerah untuk bertanggung jawab atas kegagalan dan keberhasilan pelaksanaan misi dan tujuan suatu organisasi/pemerintah, yang ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik (Astuti et al., 2015). Sistem pengendalian intern pemerintah mengurangi kemungkinan kekeliruan, kesalahan pencatatan dan perhitungan dapat diminimalkan untuk mengurangi kemungkinan pemerintah daerah mengalami kesalahan dalam pengambilan keputusan pelaporan keuangan yang akuntabel dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Apabila dilaksanakan dengan benar, akuntabilitas menghasilkan sistem pengelolaan keuangan yang lebih terbuka dan akuntabel kepada publik serta mencapai maksud dan tujuan pemerintah daerah. Maka dari itu berdasarkan fenomena yang telah terjadi, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektifitas sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap

akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?

2. Bagaimana pencegahan kecurangan akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu menjawab beberapa rumusan masalah sesuai dengan fenomena yang ada, antara lain tujuan penelitian ini untuk :

1. Menguji dan menganalisis pengaruh efektifitas pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh pencegahan kecurangan akuntansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan efek domino dasar mengenai pengetahuan dasar ilmu ekonomi khususnya sektor akuntansi pemerintahan sehingga pembaca dapat menerapkan pada permasalahan di dunia kerja untuk memperoleh pengalaman dalam penelitian dan aplikasi ilmu dari aktivitas pengendalian internal, kecurangan akuntansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada pemerintah daerah (Pemda).

1.4.2. Manfaat Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sarana literatur evaluasi bagi OPD khususnya di Kota Semarang terkait dengan fungsi dan tanggungjawab OPD dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah guna membangun tata kelola pemerintahan yang baik.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan menyatakan bahwa terdapat hubungan antara dua pihak, yaitu pihak yang bertindak sebagai agen dan prinsipal. Teori ini digunakan untuk menjelaskan hubungan kompleks antara berbagai lembaga pemerintah (Anggraini dan Riharjo, 2017). Dalam Teori ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan principal dan agent untuk mengevaluasi lingkungan di mana keputusan harus dibuat dan dievaluasi untuk mempermudah pembagian keputusan antara prinsipal dan agen sesuai dengan kontrak. Ada anggapan bahwa teori ini memiliki asimetri informasi yang besar antara pemerintah yang mendapat akses langsung terhadap informasi, dengan masyarakat. Dengan adanya informasi asimetris ini, sangat memungkinkan bagi agen untuk melakukan kecurangan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan akuntabilitas kinerja untuk mengurangi asimetri informasi.

Pada sektor publik diketahui ada hubungan keagenan antara masyarakat dan pemerintah. Dalam hal ini masyarakat sebagai prinsipal dan pemerintah sebagai agen. Demikian pula akuntabilitas adalah suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik, yang wajib menyampaikan, melaporkan dan mengungkapkan segala tindakan yang menjadi tanggung jawabnya kepada prinsipal, yang berhak menuntut pertanggungjawaban tersebut.

Dari penjelasan di atas, teori keagenan pengelolaan pemerintah daerah perlu dikaji ulang guna memastikan pengelolaannya sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku. Dengan meningkatkan akuntabilitas ini, informasi yang diterima masyarakat akan lebih seimbang terhadap pemerintah daerah, artinya asimetri informasi ini bisa berkurang dan kemungkinan untuk melakukan kecurangan pula berkurang.

2.2. Variabel-Variabel Penelitian

2.2.1. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Di dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah ialah bentuk tanggung jawab instansi pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan mandat pemerintah. Prinsip akuntabilitas menyatakan bahwa semua kegiatan dan hasil kegiatan pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat yang berperan sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di negara. Banyak definisi tanggung jawab publik, termasuk: Menurut Pedoman Penguatan Program Pembangunan Daerah Bappenas dan Departemen Pertanian (2002:19), akuntabilitas publik adalah: “Prinsip setiap kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak. implementasi kebijakan.” Mahmudin (2016), berpendapat bahwa akuntabilitas publik sebagai berikut: “Akuntabilitas dipahami sebagai tugas pihak pemegang amanah (agen), untuk mewakili segala kegiatan dan kegiatan yang mempunyai hak dan wewenang untuk menyajikan, mempertanggungjawabkan, melaporkan serta mengungkapkan semua aktivitas dan kegiatan yang mempunyai hak dan kewenangan guna menuntut

pertanggungjawaban tersebut.”

Akuntabilitas adalah suatu wujud konkrit dari kewajiban OPD untuk bertanggung jawab atas keberhasilan setiap visi dan misi yang diembannya. Asas akuntabilitas mengatur bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir pelaksanaan harus mampu dipertanggungjawabkan ke publik. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, berpendapat bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa segala hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mampu dinilai dengan uang seperti kekayaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban daerah. Pengelolaan keuangan daerah, yaitu segala aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan pertanggungjawaban publik yang mana semua proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan wajib dilaporkan serta dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD. Masyarakat tidak hanya berhak mengetahui pengelolaan keuangan daerah, tetapi berhak menuntut pertanggungjawaban atas implementasi dan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Dengan tuntutan akuntabilitas publik ini, sistem pelaporan keuangan dan pencatatan harus diperbaiki oleh pemerintah daerah.

Menurut Abdul Halim (2007) dalam Londa (2018), Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah ialah “asas pertanggungjawaban publik, artinya proses penganggaran yang dimulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan

harus dilaporkan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Akuntabilitas mengharuskan pengambil keputusan berperilaku sesuai amanat yang diterimanya.” Sedangkan menurut Nordiawan (2006) dalam Mulyani (2018) Pengertian akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut: “ Merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya dan kegiatan daerah pemerintahan daerah secara keseluruhan baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Output akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berupa LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang merupakan hasil laporan yang menjelaskan kinerja pemerintah daerah dalam suatu periode.”

Dari paparan pengertian di atas, tersimpulkan bahwa tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah merupakan tanggung jawab pemerintah atas kegiatannya dalam pengelolaan keuangan daerah, dengan pelaksanaan manfaat LAKIP. Informasi tentang kegiatan keuangan dan operasional akan diberikan dan diungkapkan. Baik pemerintah pusat ataupun daerah dapat menjadi subjek informasi dalam rangka menggunakan hak-hak publik, yaitu hak untuk mengetahui, untuk diinformasikan dan didengar.

Ada beberapa macam akuntabilitas, yaitu :

1. Akuntabilitas Horizontal

Akuntabilitas horizontal merupakan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas, baik secara langsung atau melalui lembaga perwakilan. Ada beberapa dimensi yang perlu dipenuhi yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran,

akuntabilitas proses, program dan kebijakan.

2. Akuntabilitas Vertikal

Akuntabilitas vertikal merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan kepada otoritas tertinggi seperti dinas kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Menurut Superdi (2017) ada beberapa indikator yang digunakan untuk akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yaitu :

1. Berprinsip pada peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku
2. Pertanggungjawaban kepada publik
3. Terbuka, cepat dan tepat
4. Penyusunan APBD
5. Memonitor dan mengevaluasi manajemen

2.2.2. Pencegahan Kecurangan Akuntansi (Fraud)

Menurut Hery (2016) defisini fraud adalah sebagai berikut : “Kecurangan menggambarkan setiap penipuan yang disengaja, yang dimaksudkan untuk mengambil aset atau hak orang atau pihak lain. Dalam konteks audit atas laporan keuangan, kecurangan diartikan sebagai suatu salah saji laporan keuangan yang disengaja. Dua kategori utama adalah pelaporan keuangan yang curang dan penyalahgunaan aset.” Menurut Valery (2016) definisi kecurangan (fraud) adalah : “Mendeteksi kecurangan adalah upaya untuk mendapatkan indikasi awal yang cukup mengenai tindak kecurangan, sekaligus mempersempit pelaku kecurangan (yaitu, ketika pelaku menyadari praktiknya telah diketahui, maka sudah terlambat

untuk menghindar).” Menurut Sawyer (2017) menyatakan bahwa: ”Kecurangan adalah representasi palsu atau menyembunyian fakta material untuk mempengaruhi seseorang agar mengambil bagian dalam sesuatu yang berharga, baik di dalam maupun di luar organisasi.”

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan fraud sebagai suatu tindak perlakuan curang atau tindak ketidakjujuran yang diartikan pula sebagai tindak penipuan mengakali, dan tidak selaras dengan hati. Fraud di Indonesia terasa lebih familiar disebut dengan korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan tereformasi menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dituliskan bahwasanya korupsi adalah bagian dari tindak penipuan. Menurut Institute of Internal Auditors (IIA) dalam Karyono (2013), fraud adalah serangkaian tindakan tidak sah dan ilegal yang ditandai dengan niat yang disengaja. Dalam pengertian ini, penipuan didefinisikan sebagai setiap tindakan yang tidak biasa atau ilegal yang dilakukan dengan sengaja dengan tujuan tertentu, seperti menipu atau mengirimkan citra buruk kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar organisasi.

Penipuan adalah praktik tak terduga, licik, picik dan tidak jujur yang digunakan untuk menipu dan menyebabkan kerugian. Sebagaimana didefinisikan oleh Black Law Dictionary (2013) dalam Priantara (2013), khususnya, suatu tindakan penipuan atau kebohongan yang disengaja, cara curang atau tidak jujur untuk mendapatkan atau kehilangan uang, properti atau hak hukum milik orang lain, baik dengan tindakan atau dengan kematian. akibat dari perbuatan itu sendiri. Tujuan penipuan adalah untuk menguntungkan baik individu maupun kelompok

yang secara tidak adil mengeksploitasi peluang, secara langsung atau tidak langsung, dengan merugikan orang lain.

Profesional dan organisasi profesional mendefinisikan penipuan sedikit berbeda, karena tindakan melakukan fraud juga berbeda. Namun, definisi penipuan yang berbeda pada prinsipnya tidak berbeda. Definisi fraud lebih menitikberatkan pada akibat hukum seperti penggelapan, pencurian karena kesalahan, penyalahgunaan kekuasaan, misrepresentasi keuangan dan bentuk-bentuk penipuan lainnya yang dapat merugikan orang lain atau menguntungkan pelaku. Setiap penipuan adalah anomali yang jika tidak dihindari atau ditangani, akan terus berlanjut dan menyebabkan kerusakan yang lebih besar. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ada unsur-unsur konstitutif dari kejahatan yang disengaja, yaitu: (1) Ada tindakan pelanggaran hukum. (2) Dibuat oleh orang-orang di dalam dan di luar organisasi (3) Laba. (4) Kerusakan langsung atau tidak langsung pada pihak ketiga.

Dalam Priantara (2013), *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) adalah asosiasi yang berbasis di Amerika Serikat yang didedikasikan untuk mencegah dan memerangi penipuan dan mengklasifikasikan penipuan ke dalam tiga kategori berikut: (1) Pengambilalihan Ketenagakerjaan meliputi penyalahgunaan, penyelewengan atau pencurian harta benda atau harta benda Anda oleh pihak internal dan/atau eksternal. Jenis fraud ini paling klasik dan paling mudah dideteksi karena bersifat *tangible* atau dapat diukur dan dihitung (*determined value*). Pengungkapan penggelapan terjadi melalui kombinasi teknik audit dan investigasi. Kedua cara ini terbilang seimbang dalam penanganan kasus

penggelapan. (2) Pernyataan atau laporan penipuan umumnya diidentifikasi sebagai penipuan manajerial atau penipuan manajerial karena sebagian besar pelaku berada di tingkat atau posisi manajerial (direktur atau eksekutif dan manajemen senior).

Pelaporan penipuan mencakup tindakan pejabat, direktur, dan eksekutif perusahaan atau lembaga pemerintah untuk menyembunyikan posisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan atau memodifikasi penyajian laporan keuangan untuk keuntungan dan kewajiban pribadi atau terkait jabatan (3) Penyusunan - termasuk penyusunan - penyalahgunaan kekuasaan atau konflik kepentingan, pemerasan, hadiah ilegal, umumnya dikenal sebagai hadiah dan bonus sehubungan dengan bisnis dan transaksi lokal serta pemerasan ekonomi. Ini adalah jenis penipuan yang paling sulit dideteksi karena melibatkan kerjasama atau kolusi dengan pihak lain. Jenis penipuan ini sering tidak diperhatikan karena mitra menikmati keuntungan (simbiosis timbal balik). Tindakan yang dilakukan oleh pegawai, pejabat dan direktur suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menyamarkan keadaan keuangan yang sebenarnya melalui perencanaan keuangan atau modifikasi anggaran untuk keuntungan atau kepentingan pribadi yang berkaitan dengan jabatan dan fungsinya.

Bagian 316 dari ISA (Priantara, 2013) mengklasifikasikan penipuan ke dalam dua kategori sebagai berikut: (1) Penyalahgunaan Menurut ISA 316, penipuan ini harus dinilai untuk potensi risiko terjadinya dan, jika terjadi, untuk konsekuensi dari kecurangan termasuk laporan keuangan yang telah diaudit, berupa laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Kesalahan tersebut adalah kesalahan yang dihasilkan dari manajemen yang tidak tepat atas aset suatu entitas

yang dapat mengakibatkan tidak disajikannya laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Salah saji material dalam laporan keuangan organisasi dapat terjadi dalam berbagai cara, seperti penyalahgunaan, penyelewengan, pencurian, atau pemalsuan. Kesalahan pengelolaan aset dapat menyebabkan dokumen atau dokumen palsu atau menyesatkan dan dapat melibatkan satu atau lebih orang termasuk manajer, karyawan, atau pihak ketiga.

(2) Membuat atau menyajikan representasi yang menyesatkan atau representasi yang menyesatkan dalam laporan keuangan karena kecurangan, representasi yang menyesatkan atau penghilangan yang disengaja atas suatu jumlah, atau pengungkapan informasi dalam laporan keuangan untuk menyesatkan pengguna laporan keuangan. Tindak Fraud antara lain yakni :

1. Manipulasi, pemalsuan, perubahan catatan akuntansi dan/atau dokumen pendukung.
2. Penyajian yang salah atau penghilangan peristiwa, transaksi, atau informasi signifikan dari laporan keuangan
3. Penerapan yang salah secara sengaja mengenai prinsip akuntansi (jumlah, klasifikasi, penyajian, pengungkapan).

Penipuan dalam suatu negara dapat mempengaruhi banyak bidang kehidupan publik dan semakin besar penipuan, semakin besar dampaknya. Menurut Richard Holoway de Karyono (2013), konsultan anti KNE di Indonesia, dampak dari tindakan suap di Indonesia adalah:

1. Dampak keuangan
 - 1) Kekayaan keuangan Negara dialihkan kepada orang perseorangan atau

badan hukum.

- 2) Rendahnya pendapatan publik, terutama dari pajak
- 3) Kurangnya sumber daya untuk pelayanan publik yang diberikan kepada penduduk, seperti kesehatan, pendidikan dan manfaat lainnya.
- 4) Modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan pendapatan dan berinvestasi di luar negeri perlahan-lahan datang karena lingkungan keuangan yang tidak sehat.

2. Bagi Modal

- 1) Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan lembaga negara yang tidak efisien.
- 2) Penguasa mengutamakan kepentingan pribadi di atas negara.
- 3) Kegagalan untuk memahami kesepakatan tentang praktik tata kelola yang baik.
- 4) Hilangnya kepercayaan pada lembaga publik.

3. Modal Fisik

- 1) Banyaknya sumber daya yang hilang.
- 2) Sumber daya yang ada mengalami erosi sehingga tidak berkelanjutan.
- 3) Merosotnya infrastruktur nasional karena di bangun di bawah standar.

4. Modal Manusia

- 1) Kemampuan rakyat untuk memenuhi kebutuhan keluarganya berkurang.
- 2) Orang miskin semakin tidak dapat mengakses pelayanan pemerintah.
- 3) Kesempatan warga untuk berperan serta dalam proses melahirkan aturan yang mengatur kehidupan sangat minim.

Fraud penyakit turun temurun yang susah dihilangkan, lebih baik mencegah daripada mengobati. Tidak ada organisasi yang kebal terhadap penipuan, karena tidak peduli seberapa baik strategi anti-penipuan dan konsultan mengembangkannya, masalahnya kembali ke orang-orang. Namun, bentuk aturan dan prosedur yang dibuat sangat dipengaruhi oleh orang yang menjalankannya, karena tidak semua orang jujur dan menggertak. Oleh karena itu, upaya utama harus pada pencegahan. Menurut Steve Alberht, Priantara (2013), Albecht membagi pencegahan fraud menjadi dua kelompok sebagai berikut: (1) Pencegahan fraud melalui budaya kerja (*Soft Control*), pencegahan fraud yang berhasil harus mencakup pengendalian lingkungan dengan menciptakan budaya yang sehat, jujur, terbuka dan solidaritas satu sama lain.

Dalam budaya, empat faktor penting harus diperhitungkan untuk menciptakan budaya yang sehat, jujur, terbuka dan mendukung, yaitu pembentukan dan komunikasi kode etik yang dapat dimengerti dan etis: menghormati, memilih atau mempekerjakan orang jujur dengan pelatihan dan perilaku. sejarah perilaku menyimpang, mendidik karyawan tentang bahaya kesadaran penipuan dan program anti-penipuan di dalam perusahaan, menyediakan program untuk membantu karyawan dengan masalah keuangan, psikologis atau sosial, menciptakan lingkungan kerja yang positif. (2) Pencegahan Fraud melalui pengendalian dan manajemen internal, meliputi: penerapan pengendalian internal yang memadai untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan, mencegah kolusi, mendorong pihak ketiga untuk mematuhi kebijakan perusahaan, termasuk yang berkaitan dengan hubungan bisnis yang bebas korupsi, kolusi dan tirani, dengan memperhatikan

pemantauan dan pengakuan karyawan, khususnya perilaku menyimpang, sehingga karyawan dapat memperoleh pelatihan dini, sistem pelaporan kecurangan atau *whistleblowing* (sistem pelaporan penipuan atau curang), hukuman karena takut bersalah dan visibilitas potensi pelakunya. menyembunyikan dan secara eksplisit menghukum ketidakjujuran dan mencegah penipuan.

Menurut Sukanto (2007), Fatum (2013) mengelompokkan indikator pencegahan fraud menjadi 3 indeks, yaitu: (1) Tindakan preventif, yaitu memastikan kesejahteraan yang baik bagi karyawan, menjaga kualitas sumber daya manusia di sumber melalui "melanjutkan pendidikan atau pelatihan, meningkatkan pengawasan oleh atasan dan karyawan, oleh rekan kerja, memperkuat struktur pengendalian internal, memberikan standar jadwal kerja yang seragam, memperkuat posisi pengendalian internal, tidak bekerja di departemen dari awal sampai akhir, menambah anggaran perangkat sebagai pengendali organisasi dan memperkuat pelaksanaan kode etik. (2) Langkah-langkah investigasi dan penelitian yang dapat diambil untuk mencegah penipuan, termasuk pengembangan dan pengenalan sistem penelusuran pengaduan dan pelaporan operasi khusus selain prosedur normal, mendeteksi investigasi penipuan oleh anggota audit internal, segera memantau tanda-tanda penipuan, tetapi tidak melanggar etika atau aturan perburuhan dan berpartisipasi dalam gerakan etis. (3) Tindakan represi atau penindasan adalah tindakan yang dilakukan dengan melakukan penyidikan jika diperlukan. Jika bukti-bukti mendukungnya, maka harus dilakukan tindakan-tindakan berikut, biasanya berupa teguran, teguran, pemberhentian atau penyerahan kepada pejabat yang berwenang, serta penyitaan barang bukti, surat-surat dan

bahkan harta benda jika terbukti merupakan kekayaan akibat korupsi.

Uraian diatas menunjukkan jika penelitian ini sesuai dengan indikator menurut Kustiawan (2016) yaitu: (1) Budaya jujur dan etika tinggi, beberapa unsur menciptakan budaya jujur dan etika yang tinggi yaitu : Menetapkan tone at the top Manajemen dan dewan direksi bertanggung jawab untuk menetapkan “Tone at the Top” terhadap perilaku etis dalam perusahaan, Menciptakan lingkungan kerja yang positif dari riset yang dilakukan terlihat bahwa pelanggaran lebih jarang terjadi bila karyawan mempunyai perasaan positif tentang atasan mereka ketimbang bila mereka merasa diperalat, diancam, atau diabaikan, Pelatihan semua pegawai baru harus dilatih tentang ekspektasi perusahaan menyangkut perilaku etis pegawai. (2) Penilaian pencegahan penipuan adalah tugas manajemen, tanpa kemampuan untuk melakukan dan menyembunyikan perilaku tidak akan ada penipuan. Manajemen bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mencegah penipuan, mengambil tindakan khusus untuk mencegah penipuan, dan memantau pengendalian internal untuk mencegah dan mengidentifikasi penipuan. (3) Pengawasan komite audit, yang peran utamanya adalah mengawasi pelaporan keuangan organisasi dan proses pengendalian internal. Untuk memenuhi tanggung jawab ini, komite audit meninjau pengawasan manajemen atas pengendalian internal dan pengawasan pencegahan penipuan serta program dan pengendalian anti-penipuan manajemen. Komite audit juga membantu menetapkan "nada" yang efektif tentang pentingnya kejujuran dan perilaku etis dengan mendukung toleransi nol manajemen terhadap penipuan.

2.2.3. Sistem Pengendalian Internal

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) berpendapat bahwa sistem pengendalian

internal ialah sistem yang mencakup organisasi semua metode dan aturan yang diatur pada perusahaan guna melindungi propertinya, memeriksa keakuratan dan keandalan data akuntansi, dan meningkatkan efisiensi bisnis. Sistem Pengendalian Internal menurut Arens, A & Loebbecke, L (2008) ialah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel unit usaha lainnya yang dirancang untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan. Sistem pengendalian intern dapat memastikan bahwa pimpinan instansi agar tujuan perusahaan yang telah ditetapkan bisa tercapai, laporan keuangan yang dihasilkan oleh suatu organisasi dapat dipercaya dan aktivitas suatu organisasi telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pengendalian internal menurut Committee Of Sponsoring Organization (COSO) menyatakan bahwa “Pengendalian internal meliputi Insentif yang diberikan kepada orang atau pegawai dari suatu bagian tertentu dari organisasi atau organisasi untuk mengejar tujuan mereka.” Menurut Romney & Steinbart (2015) dalam Rachman, (2019) pengendalian internal adalah suatu proses yang diterapkan untuk memberikan jaminan yang memenuhi beberapa tujuan pengendalian internal, termasuk menjaga aset, menjaga catatan dengan cukup detail untuk pelaporan aset perusahaan yang tepat dan akurat, memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, menyusun laporan keuangan dengan kriteria tertentu, mendorong dan meningkatkan efisiensi operasional, mendorong kepatuhan dalam hal manajerial, dan memenuhi persyaratan peraturan dan perundang-undangan yang ada.

Adapun menurut Hery (2015) Kalendesang et al., (2017) definisi pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur yang dirancang

untuk melindungi aset atau aset perusahaan dari segala bentuk penyalahgunaan, memastikan bahwa informasi akuntansi perusahaan yang akurat tersedia, dan memastikan bahwa semua undang-undang dan kebijakan peraturan atau regulasi dipatuhi dan sepatutnya dilakukan dengan atau oleh perusahaan dan semua karyawan perusahaan. Menurut Santoso (2016) Pengendalian dapat dilakukan dengan memberikan motivasi kepada individu atau kelompok secara mandiri, disiplin, dan mematuhi peraturan yang ada. Selain itu dapat berpedoman pada sistem pengendalian internal pemerintah yaitu sebagai pedoman pelaksanaan dan tolak ukur untuk menguji efektivitas pelaksanaan kegiatan suatu organisasi yang mempertimbangkan aspek biaya dan manfaat, sumber daya, dan perkembangan teknologi.

Dalam kerangka regulasi, pemerintah menetapkan adanya sistem pengendalian intern dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, yang harus dilaksanakan baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Sistem pengendalian intern disebut sebagai suatu proses terpadu dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh manajemen dan seluruh pegawai dalam rangka memberikan keyakinan yang cukup terhadap pelaksanaan tujuan organisasi. melalui operasi yang efisien dan efektif, keandalan keuangan, pelaporan, perlindungan aset negara dan kepatuhan terhadap aturan. dengan hukum. Sistem pengendalian intern berguna untuk memantau jalannya kegiatan pemerintah dalam rangka pengelolaan keuangan publik yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 antara lain yakni:

1. Lingkungan pengendalian, pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menciptakan perilaku positif dan kondusif bagi penerapan sistem pengendalian internal di lingkungan kerja, dengan cara: a) mengedepankan integritas dan nilai-nilai etika; b) komitmen terhadap kompetensi; c) kepemimpinan yang kondusif; d) menetapkan struktur organisasi yang diperlukan; e) pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; f) perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya manusia yang sehat; g) Pelaksanaan peran aparat pengendalian intern pemerintah yang efektif; dan h) hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.
2. Penilaian risiko, manajer kantor wajib melakukan penilaian risiko, termasuk a) identifikasi risiko, dan b) analisis risiko.
3. Aktivitas pengendalian, aktivitas pengendalian internal adalah pedoman dan prosedur yang dapat membantu memastikan penerapan pedoman mitigasi risiko yang diidentifikasi oleh badan publik yang bertanggung jawab selama proses penetapan harga risiko. Kegiatan pengendalian meliputi: a) penilaian kinerja badan otoritas; b) pengembangan SDM; c) pengendalian pengelolaan sistem informasi; d) kontrol fisik properti; e) definisi dan tinjauan indikator dan ukuran kinerja; f) pemisahan fungsi; g) mengesahkan transaksi dan peristiwa signifikan; h) pencatatan transaksi dan kejadian yang akurat dan tepat waktu; i) membatasi akses ke sumber daya dan file mereka; j) tanggung jawab atas sumber daya dan catatan; dan k) dokumentasi yang memadai dari sistem pengendalian internal; dan transaksi dan peristiwa penting.

4. Informasi dan komunikasi harus dilakukan secara efektif. Untuk mengatur komunikasi yang efektif, manajemen badan pengatur harus, minimal: a) menyediakan dan menggunakan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; b) mengelola, mengembangkan, dan terus memperbarui sistem informasi.
5. Memantau dan memantau sistem pengendalian internal: a) pemantauan berkelanjutan b) audit ad hoc dan c) rekomendasi pemantauan hasil audit dan review lainnya.

COSO (*committe of sponsoring of organizations of the treadway commissions*) dalam Arfamaini (2016) mengemukakan bahwa indikator pengendalian intern adalah sebagai berikut : (1) Lingkungan pengendalian, yang meliputi integritas dan nilai etika organisasi, parameter pengelolaan organisasi, struktur organisasi, tugas, wewenang dan tanggung jawab, proses pengelolaan individu yang kompeten dan ketegasan untuk mendorong akuntabilitas kinerja. (2) Penilaian resiko, meliputi kejelasan tujuan, pengelolaan resiko, potensi penipuan, dan pengendalian internal. (3) Pengendalian aktivitas, meliputi prosedur otorisasi, mengamankan aset, pemisahan fungsi, dan catatan dokumentasi yang memadai. (4) Informasi dan komunikasi meliputi eksistensi, kelengkapan, akurasi, klasifikasi, tepat waktu dan posting. (5) Pemantauan, meliputi frekuensi penilaian aktivitas, fungsi internal audit, saran dari akuntan, rekonsiliasi laporan, stock opname, dan rancangan struktur pengendalian internal.

2.3. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu mengenai hubungan Akuntabilitas, Sistem Pengendalian Internal, dan Kecurangan Akuntansi untuk dijadikan landasan dan

pembandingan pada penelitian ini, yaitu :

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel dan Objek Penelitian	Hasil Penelitian
1	Mufida, Amilia Paramita Sari (2018)	Pengaruh Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Pencegahan Kecurangan (Fraud) sebagai Variabel Intervening pada Travel Haji dan Umrah di Kotamadya Jambi	Variabel Dependen: Akuntabilitas Keuangan Variabel Independen: Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi Variabel Intervening: Kecurangan (Fraud) Objek Penelitian: Travel Haji dan Umrah di Kotamadya Jambi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pengendalian internal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan kecurangan. 2) Pengendalian internal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. 3) Pengendalian internal dan ketaatan aturan akuntansi melalui pencegahan kecurangan (fraud) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas.
2	Ipma Rahma Yudanto & Nurlita Novianti (2016)	Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan Serta Dampaknya Terhadap Akuntabilitas	Variabel Dependen: Kecenderungan Kecurangan, Akuntabilitas Organisasi Variabel Independen: Kepemimpinan, Kesesuaian Kompensasi,	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Gaya kepemimpinan, kesesuaian kompensasi, keefektifan pengendalian internal dan ketaatan aturan akuntansi

			Keefektifan Pengendalian Internal dan Ketaatan Aturan Akuntansi Objek Penelitian: Universitas Brawijaya Malang	berpengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan serta, 2) Kecenderungan kecurangan berpengaruh negatif signifikan terhadap akuntabilitas organisasi.
3	Ahmad Soleh, Agus Maulana, Asrini (2019)	Pengaruh Efektivitas Pelaksanaan Pengendalian Internal, Asimetri Informasi dan Ketaatan Aturan Akuntansi terhadap Akuntabilitas Organisasi dengan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada SKPD di Kabupaten Muara Jambi)	Variabel Dependen: Akuntabilitas Organisasi Variabel Independen: Efektivitas Pelaksanaan Pengendalian Internal, Asimetri Informasi dan Ketaatan Aturan Akuntansi. Variabel Intervening: Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Objek Penelitian: SKPD di Kabupaten Muara Jambi	Pada penelitian ini menunjukkan hasil: 1) Efektivitas Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap variabel endogen Kecenderungan Kecurangan Akuntansi maupun Akuntabilitas Organisasi. 2) Pada variabel terukur Ketaatan aturan akuntansi indikator yang tidak signifikan membentuk konstruk variabel laten antara lain integritas yang tercermin dari kejujuran dalam hal mengungkap seluruh kejadian atau transaksi dalam organisasi, obyektivitas dalam penerapan prinsip sesuai

				dengan fakta dan aturan yang ada dan mampu membebaskan diri dari pengaruh kepentingan dari pihak lain yang bertentangan dengan aturan akuntansi yang berlaku, serta konsisten dalam menerapkan aturan akuntansi.
4	Ratna Purnama Sari, Citra Setia, Dekeng Setyo (2020)	Pentingnya Pengendalian Internal Untuk Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Variabel Dependen: Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Variabel Independen: Pengendalian Internal Variabel Intervening: Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Objek Penelitian: SKPD di Kabupaten Klaten	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola laporan keuangan daerah; 2) Pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
5	Neli Agustin (2019)	Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Publik pada	Variabel Dependen: Akuntabilitas Publik Variabel Independen: Perencanaan	Pada penelitian menunjukan hasil bahwa: 1) Perencanaan anggaran dan pengendalian intern

		Pemerintah Daerah Provinsi Riau	Anggaran dan Pengendalian Intern Objek Penelitian: SKPD Pemerintah Daerah Provinsi Riau	berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas publik di provinsi Riau
6	Tiffany Pratiwi (2016)	Pengaruh Penegakan Peraturan, Sistem Kompensasi, Ketaatan Aturan Akuntansi dan Moralitas Aparat Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi dengan Perilaku Tidak Etis Sebagai Variabel Intervening Serta Pengaruhnya Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus SKPD Pekanbaru)	Variabel Dependen: Kecenderungan Kecurangan Akuntansi, Akuntabilitas Kinerja Variabel Independen: Penegakan Peraturan, Sistem Kompensasi, Ketaatan Aturan Akuntansi dan Moralitas Aparat Variabel intervening: Perilaku Tidak Etis Objek Penelitian: SKPD Kota Pekanbaru	Hasil penelitian: 1) Moralitas aparat memiliki pengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. 2) Sistem kompensasi dan ketaatan aturan akuntansi tidak memiliki pengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. 3) Variabel kecenderungan kecurangan akuntansi memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 4) Pengaruh mediasi sistem kompensasi, ketaatan aturan akuntansi dan moralitas aparat berpengaruh signifikan terhadap terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi melalui perilaku tidak etis.

7	Yunita Marasabessy (2016)	Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan di Rumah Sakit Bhayangkara TK.IV POLDA Maluku	<p>Variabel Dependen: Pencegahan Kecurangan</p> <p>Variabel Independen: Pengendalian Internal</p> <p>Objek Penelitian: Rumah Sakit Bhayangkara TK.IV POLDA Maluku</p>	<p>Hasil penelitian menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Lingkungan pengendalian, penilaian risiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian; 2) Aktivitas pemantauan berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan kecurangan (fraud) jaminan kesehatan.
8	Memen Kustiawan (2016)	Pengaruh Pengendalian Intern Dan Tindak Lanjut Temuan Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Yang Berimplikasi Terhadap Pencegahan Fraud	<p>Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan, Pencegahan Fraud</p> <p>Variabel Independen: Pengendalian Intern Dan Tindak Lanjut Temuan Audit</p> <p>Objek Penelitian: seluruh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Jawa Barat</p>	<p>Pada penelitian menunjukkan hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengendalian intern (20,27%) lebih dominan daripada tindak lanjut temuan audit (12,27%) dalam mempengaruhi kualitas laporan keuangan, dan pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap pencegahan fraud sebesar 2,89%. 2) Secara keseluruhan variable pengendalian intern, tindak lanjut temuan audit, dan kualitas laporan keuangan secara

				bersama-sama berpengaruh terhadap pencegahan fraud sebesar 35,96%.
--	--	--	--	--

2.4. Pengembangan Hipotesis

2.4.1. Pengaruh Efektifitas Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengendalian intern adalah pondasi terkuat dari suatu perusahaan. Dimana sistem pengendalian internal mencakup berbagai perangkat manajemen yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan, menjaga aset negara & keandalan laporan keuangan dan data keuangan. Sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang terus menerus dilakukan oleh unit yang tugas dan fungsinya melakukan verifikasi melalui audit dan evaluasi bahwa pengelolaan keuangan daerah telah sesuai rencana, serta peraturan perundang-undangan.

Sistem pengendalian internal pemerintah daerah dilakukan dengan tujuan memberikan kepercayaan dalam mencapai efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan laporan keuangan, dan keamanan aset. Sistem pengendalian internal pemerintah dapat melaksanakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang efektif, seperti pemeriksaan barang, fisik kas dan pencatatan akuntansi dann mampu menindaklanjuti hasil wawancara yang diberikan oleh pemeriksa laporan keuangan.

Teori keagenan mengasumsikan ada banuak asimetri informasi antara agen yang memiliki akses langsung ke informasi dan prinsipal. Adanya asimetri

informasi ini yang menyebabkan terjadinya kecurangan atau korupsi oleh agen. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mampu meningkatkan pengendalian internal atas kinerjanya sebagai mekanisme check and balance untuk mengurangi asimetri informasi. Berdasarkan teori keagenan, pengelolaan pemerintah daerah harus dipantau guna memastikan pengelolaan yang dilakukan sesuai dengan berbagai aturan dan ketentuan yang berlaku. Peningkatan akuntabilitas informasi pemerintah daerah dari masyarakat menjadi lebih berimbang kepada pemerintah daerah, sehingga dapat mengurangi asimetri informasi yang terjadi. Korupsi cenderung berkurang karena berkurangnya asimetri informasi.

Hasil penelitian Sari et al., (2020) dan Agustin (2019), menyatakan bahwa sistem pengendalian internal ini berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Semakin tinggi efektivitas pengendalian internal semakin baik akuntabilitas aparat pengelola keuangan daerah. Sebaliknya hasil penelitian Mufidah & Sari (2018) dan Oktaviani & Sari (2020) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

2.4.2. Pengaruh Pencegahan kecurangan Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Buruknya kinerja akuntabilitas instansi pemerintah Indonesia disebabkan banyaknya faktor, yaitu adalah berkembangnya kecurangan akuntansi yang terjadi di berbagai instansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja adalah hasil suatu organisasi

yang dicapai melalui pemenuhan tanggung jawab manajemen atas kepercayaan yang dipercayakan kepadanya. Pengakuan kewajiban ini timbul dari tidak adanya penipuan akuntansi dalam cabang. Untuk mengurangi kecurangan akuntansi yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedang dilakukan perbaikan. (Pratiwi et al., 2016).

Hubungan keagenan ialah kontrak di mana satu orang ataupun lebih (principal) memerintahkan orang lain (agen) untuk melakukan layanan atas nama prinsipal dan memberdayakan agen untuk membuat keputusan terbaik untuk prinsipal. Inilah penyebab terjadinya asimetri informasi antara kedua belah pihak. Keinginan itu untuk mengkompensasi tinggi, sehingga agen memiliki peluang untuk melakukan moral hazard. Selain itu, agen memiliki lebih banyak informasi tentang aktivitas dan kinerja perusahaan daripada prinsipal. Hal ini menimbulkan peluang (opportunity) agen untuk melakukan kecurangan. Jika kedua belah pihak memiliki tujuan yang sama, yaitu memaksimalkan nilai perusahaan, maka agen dipercaya untuk bertindak dengan cara yang sesuai dengan kepentingan prinsipal.

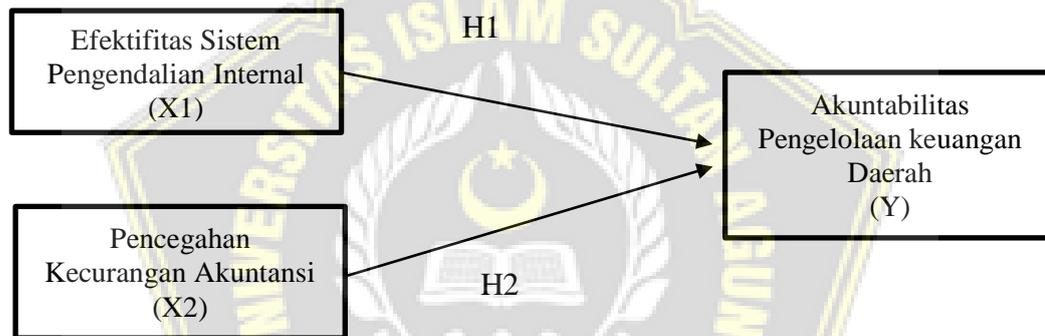
Hasil dari penelitian Pratiwi et al., (2016) menyatakan bahwa kecenderungan kecurangan akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dimana semakin berkurangnya kecurangan akuntansi yang terjadi akan berdampak pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang semakin baik. Sebaliknya hasil penelitian Yudanto (2016) menyatakan bahwa kecenderungan kecurangan akuntansi berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Pencegahan kecurangan Akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas

pengelolaan keuangan daerah

2.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat dinilai dari beberapa hal. Contohnya dapat didukung oleh aktivitas pengendalian internal. Ketika pendukung tersebut telah dilakukan secara baik maka akan tercipta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang dapat meningkatkan kemampuan dalam mendeteksi kekurangan dalam laporan keuangan. Berdasarkan penjabaran tersebut, maka kerangka konseptual teoritis dalam penelitian ini dapat digambarkan seperti berikut:



Gambar 2.1

Kerangka Penelitian

“Model Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kota Semarang Tahun 2021”

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penjelasan (*explanatory research*). Menurut Sugiyono (2015) *explanatory research* adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan peran variabel yang diteliti dan pengaruhnya antara satu variabel dengan variabel lainnya. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan hubungan dan pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat dalam hipotesis. Dalam penelitian menggunakan metode penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang memperoleh hasil dari adanya penyebaran kuesioner terhadap responden dan dilakukan berdasar fenomena yang ada untuk dilakukan pembuktian berdasar angka statistik. Sugiyono (2015).

3.2. Populasi dan Sampel

3.2.1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang digunakan dalam penelitian termasuk seluruh makhluk hidup yang ada dalam suatu kawasan geografis. Pada penelitian ini melibatkan populasi semua pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Semarang.

3.2.2. Sampel

Sampel merupakan sebagian dari unit populasi yang diteliti, karena populasi yang besar maka tidak semua populasi dijadikan sampel penelitian. Teknik pengambilan sampel adalah metode *purposive sampling*. *Purposive sampling*

adalah pengambilan sampel dengan memilih kriteria tertentu. Adapun kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah kepala dinas, sekretaris, kepala sub.bagian keuangan yang memiliki tanggungjawab atas pengelolaan keuangan yang terdapat di Pemerintah Daerah Kota Semarang (34 OPD).

3.3. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer. Sumber data berasal langsung dari responden melalui pengisian kuesioner yang diberikan langsung kepada staff OPD di Kota Semarang.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode survey lapangan dengan teknik kuesioner. Survei adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pemberian serangkaian pertanyaan tertulis kepada responden. Untuk mengukur pendapat responden digunakan 5 point skala Likert, dengan perincian:

1 = Sangat Tidak Setuju

2 = Tidak Setuju

3 = Netral

4 = Setuju

5 = Sangat Setuju

3.5. Variabel, Definisi Operasional dan Indikator

3.5.1. Variabel Independen (X)

Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain (dependen). Variabel independen dalam penelitian ini yaitu aktivitas pengendalian (X_1) dan pencegahan kecurangan akuntansi (X_2).

3.5.2. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y₁).

Tabel 3.1

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

No.	Variabel dan Definisi Operasional	Indikator	Pengukuran Skala
1.	Sistem pengendalian Intern ialah suatu proses pemantauan kinerja dan pengambilan keputusan guna mencapai hasil yang diharapkan.	1. Lingkungan pengendalian 2. Penilaian risiko 3. Kegiatan pengendalian 4. Informasi dan komunikasi 5. Pemantauan Sumber : Krismiaji (2015)	Skala Likert
2.	Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan pertanggungjawaban unit organisasi pemerintah yang telah diberikan kepercayaan kepada publik untuk mengelola sumber daya dan pelaksanaan kebijakan guna mencapai tujuan yang diharapkan melalui laporan keuangan pemerintah secara periodik.	1. Sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku 2. Pertanggungjawaban kepada publik 3. Terbuka, cepat dan tepat 4. Penyusunan APBD 5. Memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen Sumber : Superdi (2017)	Skala Likert
3.	Fraud sektor publik adalah persepsi pegawai di instansi pemerintah tentang kecurangan akuntansi yang terjadi di sektor publik.	1. Budaya jujur dan etika tinggi, 2. Tanggungjawab manajemen untuk mengevaluasi pencegahan <i>fraud</i> , dan 3. Pengawasan oleh komite audit. Sumber : Tunggal (2012)	Skala Likert

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu metode menganalisis data dengan tujuan untuk mengolah data tersebut menjadi informasi, memahami sifat-sifat data, dan membantu memecahkan masalah dalam kegiatan penelitian. Sehingga untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian digunakan program komputer yaitu SPSS yang dapat mengolah data statistik dengan cepat dan tepat. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis deskriptif.

3.6.1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah teknik analisis yang ditunjukkan dalam perkembangan situasi dan memberikan gambaran tentang situasi tertentu dengan menggambarkan sifat objek penelitian. Dalam hal ini akan menunjukkan gambaran dan tanggapan dari responden terhadap masing-masing variabel yang diteliti.

3.6.2. Uji Instrumen

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur apakah suatu survei efektif. Kuesioner dianggap valid apabila pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner tersebut dapat mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2016). Untuk menguji apakah kuesioner valid, bandingkan r_{hitung} dengan r_{tabel} untuk degree of freedom (df) = $n-2$ (dimana n adalah jumlah sampel).

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan instrumen tes yang digunakan untuk mengukur angket yang merupakan indikator variabel. Uji reabilitas ini dilakukan dengan uji *cronbach alpha*. Hasil dianggap reliabel apabila nilai *cronbach alpha* > 0,60 dan

tidak realibel jika nilai *cronbach alpha* < 0,60.

3.6.3. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Model regresi dengan distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian yaitu uji normalitas data yang bertujuan untuk menguji apakah data, variabel terikat dengan variabel bebas keduanya berdistribusi normal. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan *One Sample Kolmogorof Smirnof*. Apabila nilai signifikan lebih dari 0,05 artinya data terdistribusi normal. Namun, apabila signifikan lebih kecil dari 0,05 artinya data tidak terdistribusi normal.

2. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas memiliki tujuan untuk menguji apakah ada korelasi antara variabel bebas (*independent*) dalam suatu model regresi. Apabila teruji tidak adanya korelasi antara variabel bebas artinya model regresi dikatakan baik. Untuk mengetahui apakah ada korelasi, dapat melihat (1) nilai *tolerance* dan kebalikannya, dan (2) *variance inflation factor*. Nilai toleransi digunakan untuk mengukur variabel independen terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jika nilai toleransi rendah sama dengan nilai VIF ($VIF = 1/\text{toleransi}$), menunjukkan toleransi tinggi. Batas yang digunakan oleh nilai *tolerance* 0,10 atau nilai VIF lebih besar dari 10.

3. Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah model regresi memiliki kesamaan dari residual untuk semua pengamatan dalam model

regresi. Adanya heteroskedastisitas dapat diketahui dengan menggunakan uji Glejser (Ghozali, 2016). Pada uji Glejser, apabila nilai signifikan $> 0,05$ artinya tidak terdapat heteroskedastisitas. Selain menggunakan uji Glejser dalam penelitian disertai dengan melihat grafik scatterplot. Mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan mempertimbangkan ada tidaknya pola tertentu pada scatterplot antara SCESID dan ZPRED, dimana pada sumbu Y adalah prediksi Y dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya).

Dalam heteroskedastisitas ada beberapa dasar analisis yang digunakan yaitu:

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) artinya terjadi heteroskedastisitas.
- b. Tidak terjadi heteroskedastisitas jika tidak ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y.

3.6.4. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis Tujuan dari analisis regresi linier berganda adalah untuk membangun hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Persamaan regresi linier berganda adalah :

$$Y : b_1X_1 + b_2X_2 + e_1$$

Keterangan :

b : Koefisien regresi

Y : Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

X₁ : Efektifitas sistem pengendalian internal

X₂ : Pencegahan kecurangan akuntansi

e : *error term*

3.6.5. Analisis Uji Hipotesis

1) Uji Signifikan Simultan (Uji statistik F)

Uji statistik F bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Uji ini dikenal dengan nama *goodness of fit* (kebaikan model regresi). Taraf kepercayaan yang dipergunakan yaitu 95% atau $\alpha = 5\%$. Prosedur pengujian menggunakan uji-F sebagai berikut :

- a. Menghitung besarnya F penelitian. Besarnya F penelitian terdapat pada hasil perhitungan SPSS
- b. Menentukan tingkat signifikansi sebesar $\alpha=5\%$ atau $\alpha=0,05$
- c. Menentukan uji kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

H_0 ditolak jika F statistik $< 0,05$ atau $F_{hitung} > F_{tabel}$

H_0 diterima jika F statistik $> 0,05$ atau $F_{hitung} < F_{tabel}$

2) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai yang mendekati satu artinya bahwa variabel dependen mampu memberikan hampir semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi variasi variabel terikat. Untuk mengetahui besarnya variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikat, hal ini dapat diketahui dari nilai koefisien determinasi. Ini diwakili oleh nilai *Adjusted R Square* (R^2) yang disajikan. Untuk setiap tambahan variabel independen, maka *R square* meningkat terus, terlepas dari apakah variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan

terhadap variabel dependen atau tidak.

3) Uji Hipotesis (Uji statistik t)

Uji t menguji koefisien regresi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian uji-t adalah sebagai berikut :

- a. Menentukan hipotesis statistik
 - i H_0 : B_1 sama dengan 0, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.
 - ii H_a : B_1 tidak sama dengan 0, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.
- b. Menentukan tingkat signifikan

Tingkat signifikan sebesar 5% atau 0,05% yang artinya mempunyai toleransi kesalahan sebesar 5%.
- c. Kriteria pengambilan keputusan
 - i Apabila probabilitas lebih dari 5% (0,05) maka H_0 di terima dan H_a di tolak, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial.
 - ii Apabila probabilitas lebih kecil dari 5% (0,05) maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Responden

Responden yang dipilih dalam penelitian ini merupakan 102 pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Semarang adalah mereka yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan, yaitu kepala dinas, sekretaris, dan kepala sub.bagian keuangan. Waktu dari penyebaran kuesioner hingga pengumpulan kuesioner adalah sekitar 15 hari pada hari kerja yaitu mulai tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan 8 Juni 2022. Sampel yang dikumpulkan terdiri dari 102 responden. Lihat tabel 4.1 dibawah ini :

Tabel 4. 1
Jumlah Sampel Yang Terkumpul

Jumlah Sampel	
Keterangan	Jumlah
Kuesioner yang disebar	102
Kuesioner yang tidak kembali	0
Kuesioner yang kembali dan diolah	102
Presentase	100%

Pengelompokan responden atas hasil analisis dan temuan lapangan mendapati jika karakteristik responden terbagi berdasarkan t jenis kelamin, usia, pendidikan dan lama kerja. Berikut akan disajikan gambaran umum mengenai identifikasi responden :

4.1.1 Jenis Kelamin

Adapun hasil deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai

berikut :

Tabel 4. 2
Deskripsi Jenis Kelamin

No	Identitas Responden	Dimensi	Jumlah	%
1.	Jenis Kelamin	Laki-laki	61	59,8
		Wanita	41	40,1
		Jumlah	102	100

Sumber : Data Primer Yang Diolah 2022

Dari uraian responden terlihat bahwa mayoritas responden adalah laki-laki 61 orang (59,8%), dan wanita 41 (40,1%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi responden didominasi oleh kalangan laki-laki.

4.1.2 Usia

Usia akan menunjukkan seberapa valid responden menjawab setiap indikator pertanyaan. Pengelompokan usia memiliki tujuan untuk memberikan sejauh mana pengalaman dan tanggung jawab dari usia seseorang mempengaruhi kinerja atau kompetensi mereka dalam menjalankan pekerjaannya. Berikut adalah hasil survei deskriptif responden berdasarkan usianya :

Tabel 4. 3
Deskripsi Usia

No.	Identitas Responden	Usia	Jumlah	%
1.	Usia	17 – 27	6	5,9
		28 – 38	30	29,4
		> 39	66	64,7
		Jumlah	102	100

Sumber : Data Primer Yang Diolah 2022

Dari uraian responden terlihat bahwa mayoritas responden berusia antara 39 tahun ke atas adalah 66 orang atau (64,7%), diikuti oleh responden berusia 28 – 38 tahun sebanyak 30 orang (29,4%). Selain itu, diikuti oleh responden berusia 17 – 27 tahun sebanyak 6 orang (5,9%). Dengan demikian dapat diketahui bahwa sebagian besar pegawai yang menjadi responden di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Semarang sudah berpengalaman dalam usia kerja dan mampu menjalankan tugasnya.

4.1.3 Pendidikan

Pendidikan mencerminkan kemampuan dan pengetahuan seseorang dalam berbagai hal. Berikut adalah hasil survei deskriptif responden berdasarkan pendidikannya :

Tabel 4. 4
Deskripsi Pendidikan

No.	Identitas Responden	Keterangan	Jumlah	%
1.	Pendidikan	Diploma	1	0,10
		S1	55	53,9
		S2	43	42,2
		S3	3	2,9
		Jumlah	102	100

Sumber : Data Primer Yang Diolah 2022

Jika dilihat dari latar belakang pendidikan responden, terlihat bahwa mayoritas responden ialah sarjana sebanyak 55 orang (53,9%), diikuti oleh responden pascasarjana sebanyak 43 orang (42,2%), serta responden pada tingkat pendidikan S3 yaitu sebanyak 3 orang (2,9%) dan tingkat Diploma yang paling sedikit sebanyak 1 orang (0,10%). Hal tersebut menunjukkan bahwa pegawai OPD

Kota Semarang memiliki latar belakang pendidikan yang sangat baik sehingga mampu meningkatkan pemahaman mengenai sistem yang ada dalam organisasi.

4.1.4 Lama Kerja

Lama kerja dapat menunjukkan proses yang telah dilalui dalam menjalankan pekerjaan. Hasil deskripsi responden berdasarkan Lama kerja sebagai berikut :

Tabel 4. 5

Deskripsi Lama Kerja

No.	Identitas Reponden	Keterangan	Jumlah	%
1.	Lama kerja	1-5 tahun	6	5,9
		6-10 tahun	33	32,3
		>10 tahun	63	61,8
		Jumlah	102	100

Sumber : Data Primer Yang Diolah 2022

Pada Tabel 4.5 menjelaskan tentang lama kerja responden, waktu yang dihabiskan dalam bidang pekerjaan tentu dapat mempengaruhi pekerjaan dan pola pikir seseorang. Berdasarkan tabel tersebut, responden yang memiliki pengalaman kerja kurang adalah mereka yang telah bekerja selama 1-5 tahun yaitu sebanyak 6 orang (5,9%). Sedangkan 63 orang (61,8%) merupakan jumlah responden, terutama yang telah bekerja lebih dari 10 tahun. Hal ini mengidentifikasi bahwa sebagian besar karyawan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang beroperasi di kota Semarang atau responden, telah memiliki pengalaman dewasa, sehingga mereka mengetahui budaya dan kondisi tempat kerja.

4.2 Deskripsi Variabel

Analisis deskriptif dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang karyawan, terutama untuk variabel yang diselidiki, khususnya penilaian umum item

pelaporan yang berkaitan dengan efektivitas sistem pengendalian internal, pencegahan penipuan akuntansi dan kewajiban teritorial manajemen keuangan. Deskripsi statistik hasil survei yang ditampilkan meliputi deskripsi data tanggapan responden terhadap semua pertanyaan, dengan tujuan memudahkan pemahaman tanggapan responden secara keseluruhan terhadap survei dengan survei yang lebih terdistribusi. Untuk menentukan frekuensi intensitas keadaan untuk setiap variabel, yaitu mengalikan skor tertinggi yang diperoleh pada setiap variabel dengan jumlah item pernyataan untuk setiap variabel, kemudian membaginya menjadi tiga kategori yaitu sedang, rendah dan tinggi.

$$\begin{aligned}
 I &= \frac{R}{K} \\
 &= \frac{5 - 1}{3} \\
 &= 1,3
 \end{aligned}$$

Keterangan:

- I = Interval
 R = Skor maksimal - Skor minimal
 K = Jumlah kategori

Menurut Sugiyono (2015) pengetahuan tentang frekuensi intensitas keadaan untuk setiap variabel dapat diperoleh dengan mengalikan skor tertinggi untuk setiap variabel dengan jumlah item pernyataan yang ada setiap variabel: Berdasarkan hasil rumus di atas, rata-rata interval dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

Rendah : 1,00 – 2,30

Sedang : 2,31 – 3,61

Tinggi : 3,62 – 5,00

4.2.1 Efektifitas Sistem Pengendalian Internal (X1)

Indikator variabel Efektifitas Sistem Pengendalian Internal (X1) terdiri dari 5 indikator yaitu: Lingkungan pengendalian, Penilaian risiko, Kegiatan pengendalian, Informasi dan komunikasi, Pemantauan. Adapun tanggapan responden mengenai variabel Efektifitas Sistem Pengendalian Internal (X1) adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 6

Deskripsi Efektifitas Sistem Pengendalian Internal

Indikator	Indeks										Rata-rata	Keterangan
	SS		S		N		TS		STS			
	F	FS	F	FS	F	FS	F	FS	F	FS		
Lingkungan pengendalian	26	130	56	224	20	60	0	0	0	0	4,06	Tinggi
Penilaian risiko	30	150	51	204	21	63	0	0	0	0	4,09	Tinggi
Kegiatan pengendalian	32	160	49	196	21	63	0	0	0	0	4,11	Tinggi
Informasi dan komunikasi	24	120	53	212	23	69	2	4	0	0	3,97	Tinggi
Pemantauan	33	165	51	204	18	54	0	0	0	0	4,15	Tinggi
Nilai rata-rata											4,075	Tinggi
Total nilai rata-rata											20,372	
Min											2	
Max											5	
Nilai median normatif											17,5	

Sumber : Data primer yang diolah 2022 (Lampiran 3)

Berdasarkan Tabel 4.6, rata-rata tanggapan responden terhadap Efektifitas Sistem Pengendalian Internal sebesar 4,07 dan nilai total rata-rata 20,372 lebih besar dari nilai median normatif sebesar 17,5 yang berarti kebanyakan responden lebih cenderung menjawab setuju dan nilai tersebut pada interval kelas antara 3,62 – 5,00 atau termasuk dalam kategori tinggi, ini berarti responden telah menilai bahwa efektifitas sistem pengendalian internal yang ada di Organisasi Perangkat

Daerah (OPD) di Kota Semarang sudah dinilai baik. Hal ini mengharuskan karyawan dipantau secara ketat untuk mengurangi perilaku karyawan yang tidak jujur, selain itu instansi memiliki proses kerja yang jelas untuk mengurangi kemungkinan/resiko penggelapan dan kesalahan, dan instansi mengindikasikan bahwa pemerintah tersebut melakukan kegiatan manajemen secara teratur dengan memantau dan mengevaluasi kinerja karyawan. Disamping itu semua informasi mengenai kegiatan operasional administrasi dicatat dalam sistem akuntansi yang baik, dan peraturan pemantauan dan evaluasi atas aktivitas operasional diterapkan untuk menilai pelaksanaan pengendalian internal.

Berdasarkan tanggapan terhadap lima item pernyataan, indikator “Pemantauan” memiliki nilai tertinggi sebesar 4,15. Itulah yang ditunjukkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Semarang telah memperkenalkan aturan pemantauan dan evaluasi yang tepat terhadap kegiatan operasional agar dapat mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal seperti yang diharapkan. Sedangkan untuk indikator “Informasi dan komunikasi” mendapat rating terendah dengan nilai 3,97 atau masih dalam kondisi sangat baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa instansi telah menginformasikan kegiatan operasional dalam sistem akuntansi yang baik, namun ada beberapa responden merasa bahwa masih adanya informasi yang tidak jelas dikarenakan kurangnya komunikasi yang baik diantara departemen.

4.2.2 Pencegahan Kecurangan Akuntansi (X2)

Indikator variabel Pencegahan Kecurangan Akuntansi (X2) terdiri dari 3 indikator yaitu: budaya jujur dan etika tinggi, tanggungjawab manajemen untuk

mengevaluasi pencegahan fraud dan pengawasan oleh komite audit. Adapun tanggapan responden mengenai variabel Pencegahan Kecurangan Akuntansi (X2) adalah :

Tabel 4. 7

Deskripsi Pencegahan Kecurangan Akuntansi

Indikator	Indeks										Rata-rata	Keterangan
	SS		S		N		TS		STS			
	F	FS	F	FS	F	FS	F	FS	F	FS		
Budaya jujur dan etika tinggi	29	145	43	172	27	81	3	6	0	0	3,96	Tinggi
Tanggungjawab manajemen untuk mengevaluasi pencegahan fraud	22	110	50	200	30	90	0	0	0	0	3,92	Tinggi
Pengawasan oleh komite audit	20	100	50	200	30	90	2	4	0	0	3,86	Tinggi
Nilai rata-rata											3,91	Tinggi
Total nilai rata-rata											11,745	
Min											2	
Max											5	
Nilai median normatif											10,5	

Sumber : Data primer yang diolah 2022 (Lampiran 3)

Berdasarkan Tabel 4.7, rata-rata tanggapan responden terhadap variabel Pencegahan Kecurangan Akuntansi sebesar 3,91 dan nilai total rata-rata sebesar 11,745 lebih besar dari nilai median normatif 10,5 yang sebagian besar responden cenderung setuju, artinya nilai tersebut berada dalam interval kelas antara 3,62 – 5,00 yaitu dalam kategori tinggi, yaang berarti responden menilai bahwa Pencegahan Kecurangan Akuntansi yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Semarang sudah dinilai baik. Hal ini menunjukkan bahwa instansi telah menerapkan kode etik untuk membangun budaya berintegritas dan

keterbukaan dalam perusahaan, selain itu instansi juga sudah bertanggung jawab dalam mengidentifikasi pelaporan persediaan dan mengevaluasi laporan pembukuan guna mencegah adanya kecurangan akuntansi, serta instansi secara rutin melakukan audit atas laporan keuangan yang disajikan sehingga mencegah adanya kecurangan.

Berdasarkan tanggapan terhadap 3 item pernyataan didapatkan nilai tertinggi 3,92 didapatkan pada indikator “Tanggung jawab manajemen untuk mengevaluasi pencegahan fraud”. Kondisi ini menandakan bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Semarang sudah bertanggung jawab dalam mengidentifikasi pelaporan persediaan dan mengevaluasi laporan pembukuan guna mencegah adanya kecurangan akuntansi. Disisi lain, penilaian terendah yaitu indikator “Pengawasan komite audit” dengan nilai 3,86 atau masih dalam kondisi baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa instansi telah secara rutin melakukan audit atas laporan keuangan yang disajikan sehingga mencegah adanya kecurangan, namun ada beberapa responden merasa bahwa audit yang dilakukan masih bersifat internal dan hasilnya belum di publish secara terbuka.

4.2.3 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

Indikator variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) terdiri dari 5 indikator yaitu: Sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, Pertanggungjawaban kepada public, Terbuka, cepat dan tepat, Penyusunan APBD, Memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen. Adapun tanggapan responden mengenai variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) sebagai berikut:

Tabel 4. 8

Deskripsi Akuntabilitas Keuangan Daerah

Indikator	Indeks										Rata-rata	Keterangan
	SS		S		N		TS		STS			
	F	FS	F	FS	F	FS	F	FS	F	FS		
Sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku	23	115	60	240	19	57	0	0	0	0	4,04	Tinggi
Pertanggungjawaban kepada public	35	175	47	188	20	60	0	0	0	0	4,15	Tinggi
Terbuka, cepat dan tepat	22	110	58	232	22	66	0	0	0	0	4,00	Tinggi
Penyusunan APBD	31	155	46	184	24	72	1	2	0	0	4,05	Tinggi
Memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen	23	115	60	240	18	54	1	2	0	0	4,03	Tinggi
Nilai rata-rata											4,05	Tinggi
Total nilai rata-rata											20,2647	
Min											2	
Max											5	
Nilai median normatif											17,5	

Sumber : Data primer yang diolah 2022 (Lampiran 3)

Berdasarkan Tabel 4.8, rata-rata tanggapan responden terhadap variabel Akuntabilitas Keuangan Daerah sebesar 4,05 dan nilai total rata-rata sebesar 20,2647 lebih besar daripada nilai median normatif sebesar 17,5 artinya sebagian besar responden cenderung setuju dan berada pada kelas interval atau kategori tinggi dengan nilai 3,62 – 5,00. Artinya, responden meyakini bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang ada pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Semarang sudah bagus. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa Instansi telah menyusun laporan keuangan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah, dan pihak berwenang telah melakukan pembayaran pendapatan daerah tepat waktu kepada departemen kebendaharaan daerah sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Peraturan didukung oleh bukti administrasi yang akuntabel. Disamping itu anggaran telah disajikan secara transparansi, tepat waktu dan cepat serta sesuai dengan kebutuhan instansi dalam upaya meningkatkan kinerja. Dan instansi juga selalu melakukan monitoring kinerja yang disajikan dalam sistem informasi manajemen atas pencapaian yang telah dicapai instansi.

Berdasarkan tanggapan terhadap lima item pernyataan, nilai tertinggi dicapai oleh indikator “Pertanggungjawaban kepada public” sebesar 4,15. Kondisi ini mengharuskan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Semarang secara tepat waktu menyetorkan pendapatan asli daerah kepada kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didukung dengan pencatatan administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan penilaian terendah didapatkan pada indikator “Terbuka, cepat dan tepat” dengan nilai 4,00 atau berada pada kondisi tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa instansi telah menyajikan anggaran secara transparansi, tepat waktu dan cepat, namun ada beberapa responden merasa bahwa masih ada anggaran yang dibuat tidak tepat dan tidak bermanfaat.

4.3. Uji Instrumen

4.3.1. Uji Validitas

Uji validitas dalam penelitian membantu mengukur keabsahan suatu item dalam kuesioner dengan cara melakukan perbandingan antara r -tabel dan r -hitung. Dengan sampel sebanyak 102 responden dan menggunakan taraf signifikansi 5%, diperoleh nilai $df = n - 2$, $df = 102 - 2 = 100$. Pembacaan tabel r -tabel pada taraf signifikansi 5%, menghasilkan r -tabel = 0.195. pernyataan tersebut valid jika r

hitung > r tabel. Hasil uji validitas dapat dilihat di bawah ini :

Tabel 4. 9

Uji Validitas Data

Variabel	Indikator	r hitung	r tabel	Keterangan
Efektifitas Sistem Pengendalian Internal (X1)	▪ X1.1	0,767	0,195	Valid
	▪ X1.2	0,819	0,195	Valid
	▪ X1.3	0,833	0,195	Valid
	▪ X1.4	0,646	0,195	Valid
	▪ X1.5	0,772	0,195	Valid
Pencegahan Kecurangan Akuntansi (X2)	▪ X2.1	0,873	0,195	Valid
	▪ X2.2	0,828	0,195	Valid
	▪ X2.3	0,923	0,195	Valid
Akuntabilitas Keuangan Daerah (Y)	▪ Y.1	0,787	0,195	Valid
	▪ Y.2	0,793	0,195	Valid
	▪ Y.3	0,734	0,195	Valid
	▪ Y.4	0,814	0,195	Valid
	▪ Y.5	0,710	0,195	Valid

Sumber : Hasil Output Spss 2022 (Lampiran 3)

Keseluruhan nilai signifikansi > 0.195 yang menunjukkan bahwa hasil uji dikatakan valid, sehingga instrumen penelitian ini sudah sesuai dan mampu menjabarkan variabel penelitian.

4.3.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas berguna sebagai bahan analisa kehandalan dan konsistensi instrumen. Apabila *cronbach alpha* lebih tinggi dari 0,60 mengindikasikan bahwa alat survei memiliki kemampuan yang terbukti untuk menghasilkan nilai jawaban yang konsisten dari responden. Berikut disajikan uji reliabilitas :

Tabel 4. 10
Hasil Pengujian Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
1	Efektifitas Sistem Pengendalian Internal (X1)	0,824	Reliabel
2	Pencegahan Kecurangan Akuntansi (X2)	0,845	Reliabel
3	Akuntabilitas Keuangan Daerah (Y)	0,826	Reliabel

Sumber : Hasil Output Spss 2022 (Lampiran 3)

Berdasarkan hasil uji reliabilitas diperoleh seluruh variabel penelitian memiliki nilai *cronbach alpha* yang lebih besar dari 0,60. Hal ini berarti semua item pernyataan yang digunakan sudah terbukti handal dalam menghasilkan nilai jawaban yang konsisten.

4.4. Uji Asumsi Klasik

4.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menganalisis apakah data penelitian kuantitatif penelitian berdistribusi normal. Data terdistribusi normal dapat memberikan hasil analisis data yang lebih optimal dan tidak bias. Hasil pengujian normalitas bisa dilihat dibawah ini :

Tabel 4. 11

Uji Kolmogorov Smirnov

No	Persamaan	Signifikan	Keterangan
1	Model Regresi	0,200	Data Normal

Sumber : Hasil Output Spss 2022 (Lampiran 3)

Berdasarkan uji normalitas untuk kedua model regresi diperoleh nilai signifikan 0,200 atau diatas 0,05. Artinya residual dari model regresi berdistribusi normal sehingga mampu memberikan analisa lebih optimal.

4.4.2 Uji Multikolinearitas

Analisa multikolinierisasi diimplementasikan guna mengidentifikasi potensi munculnya nilai korelasional antara aspek independen yang dianalisis di dalam riset. Kemunculan nilai korelasional dapat berakibat pada hasil analisis data yang kurang tepat dan tidak akurat. Oleh karena itu diperlukan adanya pengujian ini di dalam model regresi riset. Berikut akan disajikan hasil pengujian multikolinieritas :

Tabel 4. 12
Pengujian Multikolinearitas

No.	Variabel bebas	Tolerance	VIF	Keterangan
1.	Model regresi : Efektifitas Sistem Pengendalian Internal	0,523	1,911	Non Multikolinearitas
	Pencegahan Kecurangan Akuntansi	0,523	1,911	Non Multikolinearitas

Sumber : Hasil Output Spss 2022 (Lampiran 3)

Hasilnya, berdasarkan pengujian yang dilakukan, menunjukkan nilai yang dapat diterima untuk semua variabel independen lebih tinggi dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari nilai 10. Dapat disimpulkan bahwa semua variabel penelitian tidak memiliki adanya nilai korelasional antara aspek independen dari model regresi.

4.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari uji heterokedastisitas dimaksudkan untuk mengidentifikasi apakah nilai varians residual model regresi penelitian berbeda dengan hasil analisis data yang dilakukan dari satu periode ke periode berikutnya. Berikut hasil pengujian heteroskedastisitas :

Tabel 4. 13**Pengujian Heteroskedastisitas**

Variabel Dependen	Variabel Independen	Signifikan	Keterangan
Abs Residual	Efektifitas Sistem Pengendalian Internal	0,864	Non heteroskedastisitas
	Pencegahan Kecurangan Akuntansi	0,144	Non heteroskedastisitas

Sumber : Hasil Output Spss 2022 (Lampiran 3)

Berdasarkan dari hasil pengujian, semua variabel bebas memiliki nilai signifikan di atas 0,05. Artinya untuk model regresi dalam penelitian ini nilai residual variance tidak berbeda dengan hasil analisis data yang dilakukan dari satu periode ke periode berikutnya.

4.5. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda dimaksudkan untuk menganalisis besarnya nilai pengaruh yang diberikan oleh variabel bebas terhadap variabel terikat penelitian. Sebuah uji regresi linear berganda ditunjukkan di bawah ini :

Tabel 4. 14
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel Dependen	Variabel Independen	Koefisien Beta	t- hitung	Signifikan
Model Regresi				
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Efektifitas Sistem Pengendalian Internal	0.415	4.360	0.000
	Pencegahan Kecurangan Akuntansi	0.376	3.950	0.000

Sumber : Hasil Output Spss 2022 (Lampiran 3)

Berdasarkan Tabel 4.14, diperoleh persamaan regresi berganda berikut :

$$Y = 0,415 X_1 + 0,376 X_2 + e$$

Keterangan :

- X_1 = Efektifitas Sistem Pengendalian Internal
 X_2 = Pencegahan Kecurangan Akuntansi
 Y = Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
 e = eror

Nilai konstanta tidak digunakan untuk analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini. Konstanta adalah bilangan tertentu yang nilainya selalu sama dalam semua kondisi, sedangkan dalam penelitian ini sifat dari setiap variabel berubah-ubah dan tidak konstan, maka dari itu lebih baik tidak menggunakan nilai konstan dalam menganalisis data.

Persamaan Rumus untuk model 1 dapat diartikan sebagai berikut :

1. Koefisien variabel efektifitas sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas keuangan daerah sebesar 0,415 yang berarah positif. Artinya, semakin baik Efektifitas Sistem Pengendalian Internal oleh suatu instansi, maka semakin baik pula akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah bagi instansi tersebut.
2. Koefisien variabel pencegahan kecurangan akuntansi terhadap akuntabilitas keuangan daerah sebesar 0,376 yang berarah positif. Artinya, semakin baik Pencegahan Kecurangan Akuntansi oleh suatu instansi, maka semakin baik pula akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah bagi instansi tersebut.

4.5.1 Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis dimaksudkan untuk menganalisis hipotesis yang telah diajukan dalam penelitian dan telah terbukti diterima atau ditolak. Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 15
Hasil Uji Hipotesis

Pengaruh antar Variabel	Beta (koefisien)	t hitung	Sign. t	Keterangan
Efektifitas Sistem Pengendalian Internal → Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	0.415	4.360	0.000	H1 diterima
Pencegahan Kecurangan Akuntansi → Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	0.376	3.950	0.000	H2 diterima

Sumber : Hasil Output Spss 2022 (Lampiran 3)

1) Pengaruh Efektifitas Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah

Berdasarkan uji t diperoleh t-hitung dengan taraf 5% sebesar 4,360 dan t-tabel sebesar 1,984. Artinya, $y\text{-hitung } 4,360 > t\text{-tabel } 1,984$ dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ artinya efektifitas sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil tersebut mengimplikasikan bahwa semakin baik efektifitas sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh suatu instansi, maka semakin baik pula akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis menyatakan efektifitas sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah **Diterima**.

2) Pengaruh Pencegahan Kecurangan Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah

Berdasarkan uji t diperoleh nilai t-hitung dengan taraf 5% sebesar 3,950 dan t-tabel sebesar 1,984. Artinya, $t\text{-hitung } 3,950 > t\text{-tabel } 1,984$ dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ artinya pencegahan kecurangan akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil tersebut

mengimplikasikan bahwa semakin baik pencegahan kecurangan akuntansi yang dilakukan oleh suatu instansi, maka semakin baik pula akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, disimpulkan bahwa hipotesis menyatakan pencegahan kecurangan akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah **Diterima**.

4.5.2 Uji F (Simultan)

Uji Anova dilakukan untuk menguji apakah variabel dependen berhubungan linier dengan variabel independen. Dalam penelitian ini, pengujian statistik F dilakukan dengan melihat nilai probabilitas atau sig. Untuk nilai kurang dari 0,05 pada tabel anova, semua variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh yang besar terhadap variabel dependen. Berikut disajikan pengujian Uji Anova :

Tabel 4. 16

Uji F (Anova)

No.		F hitung	Signifikan
1	Persamaan Regresi	55.784	0.000

Sumber : Hasil Output Spss 2022 (Lampiran 3)

Berdasarkan uji Anova diperoleh nilai F hitung sebesar $55.784 > F_{tabel}$ 2,700 dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Ini berarti bahwa efektifitas sistem pengendalian internal dan pencegahan kecurangan akuntansi secara bersama – sama mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah .

4.5.3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi *Adjusted R Square* yang disesuaikan digunakan untuk mengukur variasi variabel dependen pada model. Nilai pada *Adjusted R Square* yaitu berkisar dari 0 hingga 1. Nilai yang kecil menandakan bahwa keandalan

variabel independen menerangkan variasi variabel dependen. Berikut disajikan hasil *Adjusted R Square* :

Tabel 4. 17

Uji Koefisien Derterminasi

No.		R Square	Adjusted R Square
1	Persamaan Regresi	0.530	0.520

Sumber : Hasil Output Spss 2022 (Lampiran 3)

Berdasarkan persamaan regresi pertama tabel 4.17, nilai *Adjusted R-Square* adalah 0.520. Artinya variabel Efektifitas Sistem Pengendalian Internal dan Pencegahan Kecurangan Akuntansi mampu menjelaskan 52%, dan sisanya 48% dijelaskan oleh faktor lain diluar penelitian ini.

4.6 Pembahasan

4.6.1 Pengaruh Efektifitas Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Hasil pengujian dalam penelitian ini mendapati bahwasanya efektifitas sistem pengendalian internal berpengaruh positif secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, artinya semakin efektif sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah, maka akan semakin akuntabel instansi tersebut dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengujian ini juga mendapati jika pengawasan intensif di lapangan telah dilakukan dalam lingkup OPD terhadap karyawan untuk mengurangi perilaku tidak jujur, selain itu instansi juga sudah memiliki prosedur kerja yang jelas sehingga dapat mengurangi kemungkinan/resiko penggelapan dan kesalahan. Serta instansi secara rutin melaksanakan kegiatan pengendalian dengan memantau dan mengevaluasi kinerja karyawan. Disamping itu, semua informasi mengenai kegiatan operasional administrasi dicatat dalam

sistem akuntansi yang baik, dan aturan pemantauan dan evaluasi operasional diterapkan untuk menilai pelaksanaan pengendalian internal.

Sistem pengendalian intern pemerintah daerah dilakukan dengan tujuan untuk menanamkan kepercayaan terhadap efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan, dan keamanan aset daerah. Sistem pengendalian internal pemerintah dapat memberikan akuntabilitas yang efektif untuk pengendalian keuangan daerah, seperti pemeriksaan barang, kas dan catatan akuntansi, serta mampu menindaklanjuti temuan dan wawancara auditor. Jika unit bisnis memiliki pengendalian internal yang lemah, potensi terjadinya kesalahan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah semakin besar. Untuk mengatasi permasalahan yang ada pada system pengendalian internal pemerintah, hal ini memerlukan tambahan staf akuntansi untuk mencatat, menerima, mengeluarkan, dan meningkatkan lingkungan pengendalian untuk kegiatan penilaian dan pengendalian risiko manajemen. Hal ini dapat dilakukan dengan memisahkan fungsi penyimpanan, sumber daya keuangan, system informasi dan komunikasi akuntansi. Selain itu, dapat dicapai melalui peningkatan pencegahan kecurangan, yaitu membangun struktur pengendalian internal yang lebih baik, mengefektifkan kegiatan pengendalian, meningkatkan budaya organisasi, dan mengefektifkan fungsi audit internal.

Hasil penelitian ini menguatkan penelitian yang dilakukan oleh Sari et al., (2020) dan Agustin (2019) yang menemukan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Semakin tinggi efektivitas penendalian internal semakin baik akuntabilitas aparat

pengelola keuangan daerah.

4.6.2 Pengaruh Pencegahan Kecurangan Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil eksperimen, pencegahan kecurangan akuntansi terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Semakin baik pencegahan kecurangan akuntansi dan pengelolaan yang dari agensi mencerminkan tingginya tingkat akuntabilitas instansi tersebut. Akuntabilitas kinerja adalah pencapaian organisasi melalui pemenuhan tanggung jawab manajemen atas kepercayaan yang dipercayakan kepadanya. Pengakuan kewajiban ini muncul dari tidak adanya kecurangan akuntansi dalam cabang. Perbaikan sedang dilakukan untuk mengurangi kecurangan akuntansi yang berdampak pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Pratiwi et al., 2016).

Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa instansi sudah memberlakukan aturan perilaku untuk membangun budaya integritas dan keterbukaan dalam perusahaan mereka, dimana instansi telah menyetor pendapatan daerah tepat pada waktunya ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didukung bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan, selain itu instansi juga sudah bertanggung jawab dalam mengidentifikasi pelaporan persediaan dan mengevaluasi laporan pembukuan guna mencegah adanya kecurangan akuntansi, serta instansi secara rutin melakukan audit atas laporan keuangan yang disajikan sehingga mencegah adanya kecurangan. Dengan adanya upaya-upaya pencegahan kecurangan tersebut maka akan semakin baik kualitas akuntabilitas keuangan daerah.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Pratiwi et al., (2016) menemukan

bahwa tren kecurangan akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas instansi pemerintah. Penurunan tingkat penipuan akuntansi akan memiliki efek meningkatkan akuntabilitas untuk operasi instansi pemerintah.



BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil analisis data tentang “Efektifitas Sistem Pengendalian Internal dan Pencegahan Kecurangan Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di OPD Kota Semarang” yaitu sebagai berikut :

1. Efektifitas Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Ini berarti bahwa semakin efektif suatu sistem pengendalian internal yang dimiliki suatu instansi, semakin baik pula akuntabilitas instansi tersebut terhadap pengelolaan keuangan daerah.
2. Pencegahan Kecurangan Akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah. Ini berarti bahwa semakin baik pencegahan kecurangan akuntansi, semakin baik pula akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah instansi tersebut

5.2 Saran

Adanya kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian mengarah pada saran untuk perbaikan. Beberapa saran yang dapat disampaikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Semarang sebagai berikut :

1. Terkait variabel Efektifitas Sistem Pengendalian Internal, indikator Informasi dan komunikasi mendapat nilai paling rendah diantara indikator lainnya, oleh

karena itu diharapkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Semarang hendaknya melakukan pengawasan dalam proses pembuatan laporan keuangan daerah agar lebih relevan, andal dan mudah dipahami oleh masyarakat serta dapat dipertanggung jawabkan.

2. Berkaitan dengan variabel Pencegahan Kecurangan Akuntansi, indikator Pengawasan oleh komite audit mendapat nilai paling rendah diantara indikator lainnya, oleh karena itu diharapkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Semarang hendaknya memberikan pelatihan dan pendidikan kepada komite audit yang diharapkan dengan adanya pelatihan tersebut dapat meningkatkan kinerja komite audit sehingga mampu untuk mencegah adanya kecurangan akuntansi

5.3. Keterbatasan Penelitian

1. Objek yang digunakan dalam penelitian ini hanya mencakup OPD di Kota Semarang. Sedangkan masih banyak OPD lainnya, sehingga tidak dapat digeneralisasikan.
2. Riset ini hanya menggunakan metode penelitian kuantitatif yaitu hasil data dari penyebaran kuesioner. Oleh karena itu, peneliti mungkin tidak dapat memasukkan informasi yang mereka terima ke instansi OPD. Penelitian ini dibatasi pada variabel efektifitas sistem pengendalian internal dan pencegahan kecurangan akuntansi. Padahal masih banyak variabel lain yang mempengaruhi akuntabilitas keuangan.

5.4. Agenda Yang Akan Datang

1. Diharapkan pada periode penelitian selanjutnya dapat disarankan untuk menggantikan objek penelitian dan meningkatkan jumlah responden OPD di wilayah lain,, tidak hanya di Kota Semarang.
2. Penelitian selanjutnya yang terkait dengan penelitian ini untuk menggunakan metodologi wawancara dan menambahkan variabel lain atau menggantinya dengan variabel yang dianggap mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, baik sebagai variabel independen maupun sebagai variabel moderasi atau sebagai mediasi.



DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, A. A., Dibal, N. A., Amade, P., & Joyce, P. (2017). Effect of Internal Control Activity on Financial Accountability and Transparency in Local Government Areas of Borno State, Nigeria. *European Journal of Business and Management Wwww.Iiste.Org ISSN*, 9(30), 58–65.
- Agustin, N. (2019). Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Publik pada Pemerintah Daerah Provinsi Riau. *Akuntansi Dan Manajemen*, 14(2), 109–118. <https://doi.org/10.30630/jam.v14i2.49>
- Andari, L., & Ismatullah, I. (2019). Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Kasus Pada CV. Agung Mas Motor Kota Sukabumi). *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*, 8, 75–81.
- Arens, A. A., & Loebbecke, L. J. (2008). *Auditing Pendekatan Terpadu* (Terjemahan Oleh Amir Abadi Yusuf (ed.); Edisi Indo). Salemba Empat.
- Arfamaini, R. (2016). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah. *Applied Microbiology and Biotechnology*, 85(1), 2071–2079.
- Astuti, S. I., Arso, S. P., & Wigati, P. A. (2015). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Terhadap Akunatabilitas Kinerja SKPD Di Merauke. *Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan Di RSUD Kota Semarang*, 3, 103–111.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kalendesang, A. K., Lambey, L., & Budiarmo, N. S. (2017). Analisis Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Persediaan Barang Dagang Pada Supermarket Paragon Mart Tahuna. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 131–139. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17443.2017>
- Karyadi, M. (2019). Pengaruh sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas keuangan desa (studi di Kecamatan Aikmel dan Kecamatan Lenek tahun 2018). *Journal Ilmiah Rinjani*, 7(2), 33–46.
- Karyono. (2013). *Forensic Fraud* (D. Hardjono (ed.)). Yogyakarta: Andi, 2013.
- Krismiaji. (2015). *Sistem Informasi Akuntansi* (Edisi Keem). Yogyakarta: UPP

STIM YKPN.

- Londa, V. Y. (2018). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Di Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(52).
- Mahmudin. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. UII Press Yogyakarta.
- Mufidah, M., & Sari, A. P. (2018). Pengaruh Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Pencegahan Kecurangan (Fraud) sebagai Variabel Intervening pada Travel Haji dan Umrah di Kotamadya Jambi. *EKONOMIS : Journal of Economics and Business*, 2(2), 218. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v2i2.46>
- Mulyani, S. (2018). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Value For Money, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. 75383. <https://eprints.unisbank.ac.id/id/eprint/5243>
- N.R, A. dan R. (2017). “Pengaruh Politik Dinasti Terhadap Akuntabilitas Pemerintahan Dengan Pengendalian Intern Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1–23.
- Oktaviani, M. A., & Sari, D. P. (2020). Pengaruh kemandirian daerah, kinerja pemerintah daerah, dan sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(01), 186–193. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.1147>
- Pratiwi, T., Dp, E., & Rofika, R. (2016). Pengaruh Penegakan Peraturan, Sistem Kompensasi, Ketaatan Aturan Akuntansi Dan Moralitas Aparat Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akutansi Dengan Perilaku Tidak Etis Sebagai Variabel Intervening Serta Pengaruhnya Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Stud. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 3(1), 2327–2341.
- Priantara, D. (2013). *Fraud Auditing & Investigation*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rachman, R. (2019). Analisa Pengendalian Piutang Terhadap Resiko Piutang Tak tertagih Pada PT. Enseval Putera Megatrading Tbk Cabang Bogor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 7(3), 343–350. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v7i3.277>
- Sari, R. P., Mulyani, C. S., & Budiarto, D. S. (2020). Pentingnya Pengendalian Internal Untuk Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.26486/jramb.v6i1.697>
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Alfa Beta.

- Superdi. (2017). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Sijunjung)*. JOM Fekom, 4(1),%0App. 2015-2029.
- Tiara Dewi, Muhammad Amir Masruhim, R. S. (2016). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Kompetensi SDM Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. *Laboratorium Penelitian Dan Pengembangan FARMAKA TROPIS Fakultas Farmasi Universitas Muallawarman, Samarinda, Kalimantan Timur, April*, 5–24.
- Tunggal, A. W. (2012). *Audit Kecurangan dan Akuntansi Forensik*. Harvarindo.
- Wardani, D. K., & Andriyani, I. (2017). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Klaten. *Jurnal Akuntansi*, 5(2), 88–98. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i2.270>
- Yudanto, I. R. (2016). *Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan Serta Dampaknya Terhadap Akuntabilitas Organisasi (Studi Pada Universitas Brawijaya Malang)*. 4. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/3000>
- Zawawi, M. (2016). Model Akuntabilitas Kinerja Skpd Dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 1(1), 8–13. <http://ejournal.uigm.ac.id/index.php/PDP/article/view/693/844>

